



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran (TA) 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020.

Pemerintah Kota Balikpapan sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut merupakan gabungan laporan dari 36 entitas akuntansi yang merupakan unit pemerintahan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan di bawah kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Entitas akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2020 diklasifikasikan menurut urusannya antara lain:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial;
- b. Urusan Wajib *Non* Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- c. Urusan Pilihan yang terdiri dari: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan;
- d. Penunjang Urusan yang terdiri dari: Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Pendukung Urusan yang terdiri dari: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Kewilayahan yang terdiri dari: Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur.

LKPD Kota Balikpapan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan SAP Berbasis Akrua.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada dasarnya LKPD Kota Balikpapan TA 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* antara lain: masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama TA 2020.

LKPD Kota Balikpapan TA 2020 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, dan arus kas. LKPD Kota Balikpapan TA 2020 disusun dengan tujuan menyediakan informasi mengenai:

- a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

LKPD Kota Balikpapan disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- n. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan;
- o. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- p. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Bab V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 5.2.1. Perubahan SAL
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.3.2. Kewajiban

5.3.3. Ekuitas

5.4. Laporan Operasional (LO)

5.4.1. Pendapatan LO

5.4.2. Beban

5.4.3. Kegiatan Non Operasional

5.4.4. Pos Luar Biasa

5.5. Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1. Perubahan Ekuitas

5.7. Pengungkapan Informasi Lainnya

Bab VI : Penutup



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian dunia, tidak terkecuali dampak tersebut pun dirasakan Kota Balikpapan. Balikpapan yang perekonomiannya mengandalkan industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan sangat merasakan dampak tersebut. Pembatasan sosial yang dilakukan sebagai salah satu kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 memberikan dampak terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Perekonomian Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0.69 persen yang disebabkan oleh kinerja sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, terutama pada sektor transportasi dan akomodasi.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 2.57%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9%.
- c. Gini Ratio sebesar 0.311%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80.01%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -0.69%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0.65%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp103,60 triliun

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selama masa pandemi COVID-19 jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan bertambah sebesar 1.240 juta jiwa atau naik sebesar 0.15% dari tahun sebelumnya. Berkurangnya / menurunnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah hingga 35 persen dan kenaikan harga barang dan jasa di masa pandemi menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0.65 persen dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Peningkatan setengah pengangguran dan pengangguran karena krisis yang terjadi saat ini mendorong penduduk yang sebelumnya beresiko miskin menjadi miskin.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	2	3	4	5
1	Kota Balikpapan (%)	2.42%	2.57%	0.15%
2	Kota Balikpapan (Ribuan Orang)	15.780 juta	17.020 juta	1.240 juta
3	Provinsi Kalimantan Timur (%)	5.94%	6.10%	0.16%
4	Nasional (%)	9.22%	10.19%	0.97%
5	Peringkat Provinsi	10	10	-
6	Peringkat Nasional	5	6	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebanyak 17.020 juta atau sebesar 2.57% dari penduduk Kota Balikpapan. Kota Balikpapan tercatat sebagai kota terendah tingkat kemiskinannya di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan peringkat secara nasional, Kota Balikpapan menempati urutan terendah ke-enam.

Adapun garis kemiskinan (GK) Balikpapan pada tahun 2020 sebesar Rp613.622,00 orang/bulan. Artinya, jika dalam satu keluarga memiliki 3 orang anggota rumah tangga, keluarga tersebut harus memiliki pendapatan minimal Rp1.840.866,00 agar dikatakan tidak miskin. Dilihat dari data statistik, Garis Kemiskinan Kota Balikpapan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan	0.26	0.38	0.12
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	1.015	1.031	0.016
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1.55	1.75	0.2
4.	Peringkat Provinsi	1	1	-
5	Peringkat Nasional	9	17	8

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Balikpapan naik dari 0.26 pada tahun 2019 menjadi 0.38 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Artinya, semakin



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan semakin banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan penduduk tersebut dari jurang kemiskinan.

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	2	3	4	5
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan	0.06	0.12	0.06
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0.240	0.293	0.053
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0.37	0.47	0.1
4.	Peringkat Provinsi	1	1	-
5	Peringkat Nasional	22	71	49

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Tingkat keparahan kemiskinan Kota Balikpapan pada tahun 2020 naik dari 0.06 di tahun 2019 menjadi 0.12 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan semakin tidak meratanya pengeluaran diantara penduduk miskin di Balikpapan, atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ketimpangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk miskin di Balikpapan. Di wilayah Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah.

Dimasa pandemi, usaha menurunkan angka kemiskinan daerah relatif lebih berat, dikarenakan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, meningkatnya indeks kedalaman (P1) dan keparahan (P2) kemiskinan yang semakin meningkat mengisyaratkan bahwa penduduk miskin di Balikpapan dapat dikategorikan “sangat miskin” dimana posisi besaran pendapatannya jauh dengan garis kemiskinan.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja di Kota Balikpapan pada data terakhir yang dirilis Agustus 2020 mencapai 310.169 juta orang, menurun sebanyak 9.119 juta orang dibanding angkata kerja pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 319.288 juta orang.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir masih berada di atas atau lebih tinggi dari tingkat TPT Provinsi dan Nasional.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebesar 9% atau sebanyak 27.911 juta orang, mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 7.15% atau 22.844 juta orang.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada sampai dengan Agustus 2020 sebanyak 94.340 orang, terdiri dari 9.123 orang pengangguran karena Covid-19, 7.031 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 5.289 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan 72.897 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	2	3	4	5
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	7,29%	9,00%	1,71%
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	6,6%	6,87%*	0,27%
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,23%	7,07%*	1,84%
4	Peringkat Provinsi	9,00%	0,00%	0,00%
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	0,00%

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan alat analisa yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Indeks Gini ratio Kota Balikpapan tahun 2020 adalah 0,311 meningkat sebesar 0,008 dari tahun 2019.

Tabel 5 Gini Ratio Kota Balikpapan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kota Balikpapan	0.302	0.311	0.009
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	0.330	0.328	-0.002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	2	3	4	5
3	Tingkat Nasional	0.381	0.385	0.005
3	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	-
4	Peringkat Nasional	n/a	n/a	-

Sumber Dokumen: bps.go.id

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Balikpapan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, IPM Balikpapan telah mencapai 80,01 atau menurun 0,10 poin dibandingkan dengan IPM tahun 2019 sebesar 80,11.

Pada tahun 2020, status pembangunan manusia di Balikpapan berada pada level atau kategori “Sangat Tinggi”. Status tersebut merupakan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang berada pada level atau kategori “Tinggi”.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	2	3	4	5
1	Kota Balikpapan	80.11	80.01	-0.1
2	Provinsi Kalimantan Timur	76.61	76.24	-0.37
3	Indonesia/Nasional	71.92	71.94	0.02
4	Peringkat Provinsi	3	3	-
5	Peringkat Nasional	10	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Balikpapan tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai 103,60 triliun. Ekonomi Kota Balikpapan tahun 2020 turun sebesar 0,69 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 24,45%.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Februari 2020 memberikan dampak yang bagi perekonomian di Kota Balikpapan. Pembatasan sosial yang dilakukan sebagai salah satu kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini memberikan dampak terhambatnya aktivitas ekonomi dan kinerja sektor ekonomi.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan

No	Uraian	Kota Balikpapan			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	97.699	104.769	103.660	472.864	10.839.911
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.97	4.85	-0.69	-2.85	-2.07
3	Peringkat Provinsi	3	3	3	n/a	n/a
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Dalam tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,69%. Hal ini disebabkan oleh kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksi negatif terbesar terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Februari 2020. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Balikpapan menempati urutan ke-3 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam skala Nasional, data tidak tersedia.

2.1.6 Inflasi

Inflasi Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir lebih rendah dari pada inflasi provinsi dan nasional. Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil disebabkan oleh terkendalinya inflasi bahan makanan sebagai upaya dari TPID Kota Balikpapan dan Satgas Pangan dalam program pengendalian inflasi daerah.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebesar 0,65% lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	2	3	4	5
1	Tingkat Inflasi Kota Balikpapan (%)	1.88	0.65	-1.23
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (%)	1.66	0.78	-0.88
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2.72	1.68	-1.04
4	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	n/a
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Balikpapan

Struktur perekonomian Kota Balikpapan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	745.962,47	780.094,57	750.317,42
2	Pertambangan dan Penggalian	35.529,86	35.934,21	35.326,73
3	Industri Pengolahan	45.450.065,10	47.482.416,79	47.129.972,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	69.496,29	76.027,20	81.902,24
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang	55.725,57	58.994,44	62.796,17
6	Konstruksi	9.510.131,46	10.281.792,05	10.685.554,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.561.791,70	6.946.740,64	6.907.783,53
8	Transportasi dan Pergudangan	6.277.041,97	6.308.754,17	5.551.428,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.240.280,35	1.343.770,79	1.201.373,92
10	Informasi dan Komunikasi	2.780.444,93	2.974.061,27	3.199.783,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.517.790,53	2.612.608,15	2.670.178,53
12	Real Estate	1.382.661,68	1.410.669,50	1.398.220,18
13	Jasa Perusahaan	207.531,05	214.752,26	206.620,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	940.397,44	1.000.206,72	940.656,75
15	Jasa Pendidikan	1.087.881,84	1.137.683,76	1.195.361,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	409.277,58	431.695,63	537.249,81
17	Jasa Lainnya	535.098,89	582.565,49	543.364,84
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	79.807.108,74	83.678.767,65	83.097.890,66
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	n/a	n/a	n/a
20	PDRB Provinsi	464.694.426,73	486.712.236,86	172.864.886,33



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5
21	PDRB Nasional	14.981.189.696,33	16.043.581.771,15	15.785.678.474,94
22	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	n/a
23	Peringkat Nasional	n/a	n/a	n/a

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan TA 2020 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 s.d 2021. RPJMD Kota Balikpapan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu "Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman". RPJMD juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJP Nasional. Tujuannya untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapan setiap tahun.

APBD TA 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat". Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

- pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD; dan
- semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Menyikapi pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan refocusing pada anggaran tahun 2020 untuk mengoptimalkan penanganan terkait pandemi dan berupaya memaksimalkan alokasi dalam pelaksanaan anggaran.

Beberapa kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah secara umum mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat pandemi Covid-19 yaitu sebesar Rp450.303 milyar atau 17.76%. Hal tersebut akibat adanya penurunan dari sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 34.05%, Pendapatan Perimbangan turun sebesar 10.26% dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah turun sebesar 13.85%.

Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 diproyeksikan dari pendapatan sebesar Rp2.084.616.352.502,00 dan dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun 2019 sebesar Rp323.831.718.088,00. Penerimaan Pendapatan direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp471.519.353.613,00 Dana Perimbangan Rp1.132.507.129.889,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp480.589.869.000,00

2.2.2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk tetap memprioritaskan dan fokus terhadap belanja daerah yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan refocusing belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan sebesar 136,991 milyar untuk Fokus Penanganan Kesehatan meliputi kegiatan medis dan non medis, penyemprotan didinfektan, penertiban dan keamanan, edukasi dan sosialisasi penertiban masyarakat, petugas sosial masyarakat, fasilitasi pemantauan pembinaan pelaporan dan penindakan pelaksanaan protokol kesehatan sebesar 51,347 milyar. Fokus Penanganan Dampak ekonomi sebesar 600 juta dan Fokus Jaring pengaman Sosial sebesar 74,144 milyar.

Belanja Daerah di Tahun 2020 dialokasikan untuk pengeluaran yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.101.107.946.545,53,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp1.338.976.493.488,38,00.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pos Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan merupakan alokasi untuk penyertaan modal pada PDAM, Bank Pembangunan Daerah dan Perusda.

Penerimaan Pembiayaan pada tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp323.831.718.088,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2020. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp17.732.581.650,09 yang merupakan penyertaan Modal pada BUMD.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Balikpapan TA 2020.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang menggambarkan kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

3.2.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pada TA 2020 setelah perubahan mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp237.649.524.327,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp219.222.600.966,49 atau 92,25%.

3.2.2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan pada TA 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp235.950.403.206,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp179.105.151.234,01 atau 75,91%. Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan Tahun 2020 dilaksanakan oleh: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan.

3.2.3. Urusan Perumahan Dan Fasilitas Umum

Urusan Perumahan dan Fasilitas Umum pada TA 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp385.945.459.943,48 dan dapat direalisasikan sebesar Rp355.250.470.627,96 atau 92,05%. Program dan kegiatan pada Urusan Perumahan dan Fasilitas Umum Tahun 2020 dilaksanakan oleh: Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan Dinas Perumahan dan Permukiman.

3.2.4. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada TA 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp81.732.896.681,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp70.234.705.155,27 atau 85,93%.

3.2.5. Urusan Ketertiban Dan Ketentraman

Urusan Ketertiban dan Ketentraman pada TA 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp3.218.517.620,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.481.301.609,00 atau 77,09%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketertiban dan Ketentraman dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.

3.2.6. Urusan Perlindungan Sosial

Urusan Perlindungan Sosial pada TA 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp18.435.880.821,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp15.961.780.479,49 atau 86,58%. Program dan kegiatan pada Urusan Sosial Tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, DPPMPKB dan Disdukcapil.

3.2.7. Urusan Ekonomi



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Ekonomi pada TA 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp116.808.500.961,90 dan dapat direalisasikan sebesar Rp103.668.240.243,76 atau 88,75%. Program dan kegiatan urusan ekonomi dilaksanakan oleh Disnaker, Dishub, DKUMKMP, DPMPT, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, serta BPPDRD.

3.2.8. Urusan Pariwisata dan Budaya

Urusan pariwisata dan budaya pada TA 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp15.592.899.734,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp13.135.727.324,77 atau 84,24%.

3.2.9. Urusan Pelayanan Umum

Urusan Pelayanan Umum pada TA 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp243.642.410.194,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp210.357.131.650,42 atau 86,34%.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara rinci dapat dijelaskan dalam LKPJ Walikota Balikpapan Tahun 2020. Selama pelaksanaan APBD Tahun 2020, kendala paling signifikan yang dihadapi Pemerintah Kota adalah Pandemi Covid-19 sehingga membuat beberapa kinerja tidak dapat dilakukan secara maksimal.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tanggung jawab Laporan Keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam aktifitasnya Entitas Laporan Keuangan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk kemudian digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi dalam hal ini adalah OPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Balikpapan yang berjumlah 36 OPD. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan yang terdiri dari 36 entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berikut disampaikan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

- a. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu Tahun periode.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- b. LPSAL memberikan informasi mengenai perubahan gunggungan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada tahun pelaporan.

PENDAPATAN-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BELANJA-LRA

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU.
- c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- f. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- g. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
c. Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

PEMBIAYAAN-LRA

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
d. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
e. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
f. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
h. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
i. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun anggaran tertentu.
j. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

- a. Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- b. Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

- a. LO memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- b. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas Tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

PENDAPATAN-LO

- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BEBAN

- a. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- b. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode Tahun berkenaan.
- c. Dalam hal BLU, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, bebantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- f. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya di atas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

- a. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- b. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

POS LUAR BIASA

- a. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
- b. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

- a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- c. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- d. Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat transaksi.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*), Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang

- a. Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Penyisihan Piutang

- a. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- b. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- c. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 10 Klasifikasi Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1	2	3
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Belanja Dibayar Dimuka

- Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
- Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan.

Persediaan

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan meliputi:
 - Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak disajikan sebagai persediaan.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.
- c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.
- d. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- f. Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- g. Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- h. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
 - 2) Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali deviden) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- i. Dasar investasi Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada BPD Kalimantan Timur.
 - 2) PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah pada PDAM Kota Balikpapan.

- 3) Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan.

Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 2) Peralatan dan Mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan
Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- e. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- f. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- g. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- h. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- i. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Disusutkan mengikuti masa manfaat aset induknya.
- j. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- k. Penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan siap digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Aset Lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a. Kewajiban perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan Pendapatan yang diterima dari pihak ketiga namun manfaatnya akan diberikan di periode berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Utang Dalam Negeri

- a. Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- b. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang Luar Negeri

- a. Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- b. Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris. Dalam penyajiannya, Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

- a. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivitas investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan dan Aset lain-lain.
- c. Aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- d. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

membayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Pendapatan Transfer
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah
 - 5) Belanja Bantuan Sosial
 - 6) Belanja Tak Terduga

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Penjualan investasi jangka panjang (saham, obligasi)
 - 2) Penjualan aset tetap
- b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal
 - 2) Penyertaan Modal

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

- a. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pinjaman
 - 2) Penerimaan dari Utang Obligasi
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Pokok Pinjaman
 - 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

- a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:
 - 1) Penerimaan PFK
 - 2) Penerimaan Panjar
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pengeluaran PFK
 - 2) Pengeluaran panjar

Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.

Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas dikeluarkan dari Laporan Arus Kas.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 11 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
per 31 Desember 2020 dan 2019**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Pendapatan</u>	2.084.616.352.502,00	2.515.508.487.764,14	120,67	2.469.528.492.671,23
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	471.519.353.613,00	609.057.640.903,42	129,17	764.087.241.241,05
1.2.	Pendapatan Transfer	1.534.125.698.889,00	1.830.196.140.055,00	119,30	1.702.441.251.430,18
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78.971.300.000,00	76.254.706.805,72	96,56	3.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.084.616.352.502,00	2.515.508.487.764,14	120,67	2.469.528.492.671,23
2.	<u>Belanja</u>	2.392.415.488.939,91	2.143.936.514.177,38	89,61	2.405.320.741.662,33
2.1.	Belanja Operasi	1.808.667.655.006,53	1.594.807.894.013,19	88,18	1.715.684.334.151,31
2.2.	Belanja Modal	438.747.833.933,38	428.692.685.694,51	97,71	687.770.681.357,02
2.3.	Belanja Tak Terduga	145.000.000.000,00	120.435.934.469,68	83,06	1.865.726.154,00
3.	<u>Transfer</u>	1.300.000.000,00	1.271.220.600,00	97,79	3.141.232.527,00
3.2.	Transfer Bantuan Keuangan	1.300.000.000,00	1.271.220.600,00	97,79	3.141.232.527,00
	Jumlah Belanja Dan Tranfer	2.393.715.488.939,91	2.145.207.734.777,38	89,62	2.408.461.974.189,33
	Surplus/(Defisit)	(309.099.136.437,91)	370.300.752.986,76	(119,73)	61.066.518.481,90
4.	<u>Pembiayaan</u>	309.099.136.437,91	309.171.718.088,05	100,02	262.765.199.606,15
4.1.	Penerimaan Pembiayaan	323.831.718.088,00	323.831.718.088,05	100,00	291.631.786.428,55
4.2.	Pengeluaran Pembiayaan	14.732.581.650,09	14.660.000.000,00	99,51	28.866.586.822,40
	Pembiayaan Netto	309.099.136.437,91	309.171.718.088,05	100,02	262.765.199.606,15
	Sisa Lebih Pembiayaan	-	679.472.471.074,81	-	323.831.718.088,05



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
	Anggaran (SILPA)				

Berikut penjelasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 untuk pendapatan.

5.1.1. PENDAPATAN Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp2.084.616.352.502,0 Rp2.515.508.487.764, Rp2.469.528.492.671,2

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2020 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.084.616.352.502,00 dengan realisasi sebesar Rp2.515.508.487.764,14 atau 120,67%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp45.979.995.092,91 atau 1,86%. Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2020 dan TA 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	2.084.616.352.502,00	2.515.508.487.764,14	120,67	2.469.528.492.671,23
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	471.519.353.613,00	609.057.640.903,42	129,17	764.087.241.241,05
1.2.	Pendapatan Transfer	1.534.125.698.889,00	1.830.196.140.055,00	119,30	1.702.441.251.430,18
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78.971.300.000,00	76.254.706.805,72	96,56	3.000.000.000,00

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp471.519.353.613,00 Rp609.057.640.903,42 Rp764.087.241.241,05

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	471.519.353.613,00	609.057.640.903,42	129,17	764.087.241.241,05
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	331.500.000.000,00	425.129.773.688,60	128,24	565.236.192.479,07
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	43.114.129.900,00	49.272.540.221,33	114,28	55.680.497.069,87
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.167.354.650,00	16.174.599.738,41	100,04	16.870.674.739,20
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	80.737.869.063,00	118.480.727.255,08	146,75	126.326.576.952,91

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah pada TA 2020 ditetapkan sebesar Rp471.519.353.613,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp609.057.640.903,42 atau 129,17%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar Rp764.087.241.241,05, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(155.029.600.337,63) atau (20,29)%.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp331.500.000.000,00	Rp425.129.773.688,60	Rp565.236.192.479,07

Pendapatan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 14 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	331.500.000.000,00	425.129.773.688,60	128,24	565.236.192.479,07	(140.132.665.856,47)	(24,79)
1.1.1.06.	Pajak Hotel	16.000.000.000,00	23.285.718.207,00	145,54	46.406.391.626,59	(23.120.673.419,59)	(49,82)
1.1.1.07.	Pajak Restoran	56.000.000.000,00	70.968.260.536,00	126,73	103.761.411.404,00	(32.793.382.798,00)	(31,60)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.08.	Pajak Hiburan	7.400.000.000,00	8.374.806.060,00	113,17	25.849.329.228,00	(17.474.523.168,00)	(67,60)
1.1.1.09.	Pajak Reklame	7.000.000.000,00	8.511.349.681,00	121,59	9.722.192.805,00	(1.210.843.124,00)	(12,45)
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	116.000.000.000,00	121.046.456.795,00	104,35	122.487.731.418,00	(1.441.274.623,00)	(1,18)
1.1.1.11.	Pajak Parkir	7.800.000.000,00	12.688.363.949,00	162,67	19.617.542.148,00	(6.929.178.199,00)	(35,32)
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah	1.600.000.000,00	2.007.864.693,60	125,49	2.668.658.971,60	(660.794.278,00)	(24,76)
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	19.130.500,00	127,54	57.647.000,00	(38.516.500,00)	(66,81)
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800.000.000,00	954.790.700,00	119,35	4.581.201.450,00	(3.626.410.750,00)	(79,16)
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	59.885.000.000,00	99.773.768.952,00	166,61	101.045.077.109,00	(1.297.323.293,00)	(1,26)
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	59.000.000.000,00	77.499.263.615,00	131,35	129.039.009.318,88	(51.539.745.703,88)	(39,94)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Pajak daerah pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp331.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp425.129.773.688,60 yang menandakan terdapat pelampauan target penerimaan sebesar 128,24%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp(140.132.665.856,47) atau (24,79)% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp565.236.192.479,07. Penurunan pendapatan pajak umumnya disebabkan karena melambatnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease-19* sejak Maret 2020 yang mengakibatkan rendahnya tingkat pertumbuhan Kota Balikpapan sebesar minus 0,69.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Balikpapan memberikan relaksasi kepada Wajib Pajak, yaitu dengan diterbitkannya:

- a. Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-140/2020 Tanggal 8 April 2020 tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Dan Penghapusan Denda Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- b. Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-281/2020 Tanggal 29 September 2020 tentang Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020.

Dari rincian diatas dapat dilihat pula bahwa terjadi kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Target Pajak Hotel tahun 2020 sebesar Rp16.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.285.718.207,00 atau 145,54%. Pencapaian target pada tahun 2020 dikarenakan kepatuhan wajib pajak cukup baik dan dilakukannya pengawasan secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2019 sebesar Rp46.406.391.626,59,00, penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2020 turun sebesar 49,82% dari penerimaan tahun 2019. Penurunan penerimaan akibat adanya pembatasan akses transportasi seperti Bandara dan pembatasan kegiatan masyarakat baik secara nasional dan lokal/kota, berdampak pada penurunan jumlah pengunjung di Kota Balikpapan. Hal ini juga mengakibatkan tutupnya beberapa hotel secara permanen dan beberapa hotel sementara tidak melakukan kegiatan/beroperasi.
- b. Target Pajak Restoran tahun 2020 sebesar Rp56.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp70.968.260.536,00 atau 126,73%. Pencapaian target pada tahun 2020 dikarenakan kepatuhan wajib pajak cukup baik dan dilakukannya pengawasan secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2019 sebesar Rp103.761.441.404,00, penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2020 turun sebesar 31,60% dari penerimaan tahun 2019. Penurunan penerimaan akibat adanya pembatasan akses transportasi seperti Bandara dan pembatasan kegiatan masyarakat baik secara nasional dan lokal/kota, berdampak pada penurunan jumlah pengunjung di Kota Balikpapan. Hal ini juga mengakibatkan tutupnya beberapa restoran secara permanen dan beberapa restoran sementara tidak melakukan kegiatan/beroperasi.
- c. Target Pajak Hiburan tahun 2020 sebesar Rp7.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.374.806.060,00 atau 113,17%. Pencapaian target pada tahun 2020 dikarenakan kepatuhan wajib pajak cukup baik dan dilakukannya pengawasan secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019 sebesar Rp25.849.329.228,00, penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 turun sebesar 67,60% dari penerimaan tahun 2019. Penurunan penerimaan utamanya adanya pembatasan akses transportasi seperti Bandara dan pembatasan kegiatan masyarakat baik secara nasional dan lokal/kota serta pemberlakuan protokol kesehatan menyebabkan beberapa tempat hiburan belum beroperasi dan jumlah pengunjung yang menurun secara signifikan.
- d. Target Pajak Reklame tahun 2020 sebesar Rp7.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp8.511.349.681,00 atau 121,59%. Pencapaian target pada tahun 2020 dikarenakan kepatuhan wajib pajak cukup baik dan dilakukannya pengawasan secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2019 sebesar Rp9.722.192.805,00, penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2020 turun sebesar 12,45% dari penerimaan tahun 2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya reklame yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan/event akibat dampak pandemi Covid-19.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- e. Target Pajak Penerangan Jalan tahun 2020 sebesar Rp116.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp121.046.456.795,00 atau 104,35%. Pencapaian target pada tahun 2020 dikarenakan kepatuhan wajib pajak cukup baik dan dilakukannya pengawasan secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Penerangan jalan pada tahun 2019 sebesar Rp122.487.731.418,00, penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2020 turun sebesar 1,18% dari penerimaan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya subsidi bagi pelanggan tertentu PT. PLN (Persero) dan menurunnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri karena wajib pajak tidak beroperasi akibat pandemi Covid-19.
- f. Target Pajak Parkir tahun 2020 sebesar Rp7.800.000.000 dengan realisasi sebesar Rp12.688.363.949,00 atau 162,67%. Pencapaian target pada tahun 2020 dikarenakan kepatuhan wajib pajak cukup baik dan dilakukannya pengawasan secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2019 sebesar Rp19.617.542.148,00, penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2020 turun sebesar 35,32% dari penerimaan tahun 2019. Penurunan penerimaan akibat adanya pembatasan akses transportasi seperti Bandara dan pembatasan kegiatan masyarakat baik secara nasional dan lokal/kota, berdampak pada penurunan jumlah pengunjung pada bandara dan pusat perekonomian dan perbelanjaan di Kota Balikpapan.
- g. Target Pajak Air Tanah tahun 2020 sebesar Rp1.600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp2.007.864.693,60,00 atau 125,49%. Tercapainya target tersebut karena kepatuhan wajib pajak cukup baik, serta adanya kegiatan intensifikasi serta pengawasan bersama Dinas Lingkungan Hidup secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2019 sebesar Rp2.668.658.971,60,00, penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2020 turun sebesar 24,76% dari penerimaan tahun 2019. Penurunan ini diakibatkan menurunnya kegiatan pada perusahaan, perhotelan dan pusat perbelanjaan sehingga pemakaian air bawah tanah juga mengalami penurunan.
- h. Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2020 sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.130.500,00 atau 127,54%. Tercapainya target tersebut karena kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet cukup baik seiring dengan kegiatan intensifikasi serta pengawasan secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun 2019 sebesar Rp57.647.000,00, penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2020 turun sebesar 66,81% dari penerimaan tahun 2019. Hal ini disebabkan populasi burung walet Kota Balikpapan semakin menurun, adanya migrasi tempat mencari makan dan hunian burung walet ke daerah lain menyebabkan produksi sarang burung wallet Kota Balikpapan menurun secara signifikan.
- i. Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020 sebesar Rp800.000.000 dengan realisasi sebesar Rp954.790.700,00 atau 119,35%. Tercapainya target tersebut karena adanya kegiatan intensifikasi serta pengawasan bersama Dinas Lingkungan Hidup secara berkala. Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2019 sebesar Rp4.581.201.450,00, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2020 turun sebesar 79,16% dari penerimaan tahun 2019. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berasal dari kegiatan yang tidak berkala atau insidental.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Selain itu, menurunnya perekonomian menyebabkan proses kegiatan pembangunan yang menjadi objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga menurun signifikan.

- j. Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 sebesar Rp59.885.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.773.768.952,00 atau 166,61%. Tercapainya target tersebut karena kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 cukup baik dan adanya kegiatan verifikasi dan updating data PBB-P2 yang terus dilakukan secara bertahap. Jika dibandingkan dengan penerimaan PBB-P2 pada Tahun 2019 sebesar Rp101.045.077.109,00, penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 turun sebesar 1,26% dari penerimaan tahun 2019.
- k. Target Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2020 sebesar Rp59.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp77.499.263.615,00 atau 131,35%. Tercapainya target tersebut karena tingkat kepatuhan wajib pajak cukup baik dan adanya pemberlakuan BPHTB online yang memudahkan pengawasan bersama dengan PPAT/Notaris dalam pelaporan BPHTB atas transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Jika dibandingkan dengan penerimaan BPHTB pada Tahun 2019 sebesar Rp129.039.009.318.88,00, penerimaan BPHTB pada tahun 2020 turun sebesar 39,94% dari penerimaan tahun 2019. Hal ini dikarenakan menurunnya perekonomian yang berakibat menurunnya transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

5.1.1.1.2. Pendapatan Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Retribusi Daerah Rp43.114.129.900,00 Rp49.272.540.221,33 Rp55.680.497.069,87

Merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Pembayaran Piutang	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	43.114.129.900,00	46.734.128.123,33	2.538.412.098,00	49.272.540.221,33	114,28	55.680.497.069,87	(6.407.956.848,54)
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	570.496.800,00	440.459.000,00	1.008.000,00	441.467.000,00	77,38	1.564.679.301,00	(1.123.212.301,00)
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/	13.000.000.000,00	14.227.271.439,00	378.546.300,00	14.605.817.739,00	112,35	13.814.485.083,00	791.332.656,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Pembayaran Piutang	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	43.114.129.900,00	46.734.128.123,33	2.538.412.098,00	49.272.540.221,33	114,28	55.680.497.069,87	(6.407.956.848,54)
	Kebersihan							
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.750.000.000,00	1.634.866.500,00	0,00	1.634.866.500,00	93,42	2.363.973.000,00	(729.106.500,00)
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	3.025.722.000,00	2.590.161.022,00	1.223.254.180,00	3.813.415.202,00	126,03	5.509.391.220,00	(1.695.976.018,00)
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	1.568.605.002,00	0,00	1.568.605.002,00	104,57	2.604.825.000,00	(1.036.219.998,00)
1.1.2.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	750.000.000,00	532.075.608,50	529.868.568,00	1.061.944.176,50	141,59	1.721.343.833,33	(659.399.656,83)
1.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	111.856.300,00	206.228.200,00	0,00	206.228.200,00	184,37	198.032.200,00	8.196.000,00
1.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	687.516.000,00	649.652.800,00	241.128.800,00	890.781.600,00	129,57	693.494.400,00	197.287.200,00
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.164.358.800,00	3.702.406.018,83	120.156.250,00	3.822.562.268,83	91,79	6.652.830.771,54	(2.830.268.502,71)
1.1.2.18.	Retribusi Terminal	14.650.000,00	24.650.000,00	0,00	24.650.000,00	168,26	10.500.000,00	14.150.000,00
1.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	125.000.000,00	111.193.000,00	0,00	111.193.000,00	88,95	238.125.000,00	(126.932.000,00)
1.1.2.21.	Retribusi Rumah	281.500.000,00	301.300.000,00	0,00	301.300.000,00	107,03	315.139.500,00	(13.839.500,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Pembayaran Piutang	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	43.114.129.900,00	46.734.128.123,33	2.538.412.098,00	49.272.540.221,33	114,28	55.680.497.069,87	(6.407.956.848,54)
	Potong Hewan							
1.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	250.000.000,00	263.344.500,00	0,00	263.344.500,00	105,34	468.932.500,00	(205.588.000,00)
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.682.500.000,00	2.946.219.500,00	44.450.000,00	2.990.669.500,00	177,75	3.636.600.000,00	(645.930.500,00)
1.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.000.000,00	10.459.875,00	0,00	10.459.875,00	104,60	7.830.000,00	2.629.875,00
1.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.894.000.000,00	17.119.153.658,00	0,00	17.119.153.658,00	114,94	15.360.893.661,00	1.758.259.997,00
1.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	75.530.000,00	38.640.000,00	0,00	38.640.000,00	51,16	95.280.000,00	(56.640.000,00)
1.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	106.000.000,00	227.447.000,00	0,00	227.447.000,00	214,57	244.881.600,00	(17.434.600,00)
1.1.2.33.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	115.000.000,00	139.995.000,00	0,00	139.995.000,00	121,73	179.260.000,00	(39.265.000,00)

Sesuai tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 pendapatan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp43.114.129.900,00 dengan realisasi sebesar Rp49.272.540.221,33 yang menandakan bahwa pendapatan retribusi tersebut melebihi target yang diharapkan dengan nilai sebesar 114,28%. Realisasi pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2020 mengalami penurunan senilai Rp(6.381.256.848,54) atau (11,47)% dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp55.653.797.069,87.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Dari rincian realisasi di atas dapat dilihat bahwa umumnya pendapatan retribusi di beberapa pos mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp16.167.354.650,00 Rp16.174.599.738,41 Rp16.870.674.739,20
yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp16.167.354.650,00 dengan realisasi sebesar Rp16.174.599.738,41 atau 100,04%. Pendapatan tersebut berasal dari laba/deviden atas penyertaan modal pada BUMD yaitu:

- Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba selaku pemegang 3,26% dari total saham hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan; dan
- Perusda Manuntung Sukses dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp(696.075.000,79) atau (4,13)% dari TA 2019 yang berjumlah Rp16.870.674.739,20 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.167.354.650,00	16.174.599.738,41	100,04	16.870.674.739,20	(696.075.000,79)	(4,13)
1.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik	16.167.354.650,00	16.174.599.738,41	100,04	16.870.674.739,20	(696.075.000,79)	(4,13)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

penurunan sebesar Rp(7.819.149.697,83) atau (6,19)% dari TA 2019 yang berjumlah Rp126.299.876.952,91. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran cicilan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 17 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	80.737.869.063,00	118.480.727.255,08	146,75	126.299.876.952,91	(7.819.149.697,83)
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Terpisah	0,00	0,00	0,00	55.689.300,00	(55.689.300,00)
1.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	2.250.000.000,00	7.071.361.317,93	314,28	3.825.006.822,37	3.246.354.495,56
1.1.4.04.	Pendapatan Bunga	2.700.000.000,00	5.651.986.367,00	209,33	16.718.952.155,35	(11.066.965.788,35)
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	1.300.000.000,00	4.176.955.497,88	321,30	4.175.511.246,00	1.444.251,88
1.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi	250.000.000,00	197.555.624,44	79,02	697.939.155,00	(500.383.530,56)
1.1.4.11.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	169.650.000,00	0,00	0,00	169.650.000,00
1.1.4.15.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	400.000.000,00	742.641.002,00	185,66	1.025.203.782,00	(282.562.780,00)
1.1.4.18.	Pendapatan BLUD	68.915.249.063,00	88.889.773.649,86	128,98	82.981.771.555,08	5.908.002.094,78
1.1.4.19.	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.835.541,13	(3.835.541,13)
1.1.4.22.	Tak Terduga	1.000.000.000,00	7.725.180.130,97	772,52	7.603.324.928,98	121.855.201,99



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.29.	Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel	595.000.000,00	877.933.515,00	147,55	966.734.060,00	(88.800.545,00)
1.1.4.30.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.327.620.000,00	2.977.690.150,00	89,48	8.245.908.407,00	(5.268.218.257,00)

Penjelasan lebih lanjut terkait realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Jasa giro sebesar Rp7.071.361.317,93 merupakan perolehan Bunga Giro atas penempatan kas daerah di Bank Kaltimtarra.
- b. Pendapatan bunga sebesar Rp5.651.986.367,00 merupakan perolehan bunga atas penempatan deposito jangka pendek pada Bank BRI sebesar Rp150.000.000.000,00 dan telah dicairkan pada tanggal 29 Desember 2020.
- c. Pendapatan denda pajak sebesar Rp4.176.955.497,88 merupakan pendapatan atas denda pajak terutang yang dikelola pada BPPDRD yang terdiri dari denda pajak hotel, denda pajak restoran, denda pajak hiburan, denda pajak reklame, denda pajak paker, pajak air tanah, denda pajak sarang burung walet, dan denda PBB.
- d. Pendapatan denda retribusi sebesar Rp197.555.624,44 merupakan pungutan atas denda retribusi yang dikelola beberapa OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan.
- e. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda sebesar Rp169.650.000,00 merupakan pendapatan yang dipungut oleh Satpol PP atas pelanggaran Peraturan Wali Kota Nomor 23 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- f. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp742.641.002,00 merupakan perolehan atas penjualan rumah dinas di tiga lokasi yang dijual pada tahun 2004,2010 dan 2019.
- g. Pendapatan BLUD sebesar Rp88.889.773.649,86 merupakan perolehan atas jasa layanan BLUD dan Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada RSUD, RS Khusus Bersalin Sayang Ibu, 18 Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium yang dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 18 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan BLUD TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	2	3
Jasa Layanan Umum Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu	10.470.588.641,00	7.613.192.890,00
Hasil Kerjasama Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu	390.096.199,86	431.400.736,53
Jasa Layanan Umum Puskesmas Klandasan Ilir	1.369.781.864,00	1.687.131.018,80



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	2	3
Jasa Layanan Umum Puskesmas Sepinggian Baru	1.842.136.289,78	2.422.067.812,39
Jasa Layanan Umum Puskesmas Mekarsari	1.017.457.460,51	1.259.439.498,50
Jasa Layanan Umum Puskesmas Kariangau	544.642.932,00	618.372.459,13
Hasil Kerjasama Puskesmas Kariangau	150.000,00	0,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Karang Joang	1.706.454.398,15	1.976.751.084,06
Jasa Layanan Umum Puskesmas Baru Tengah	1.046.051.570,00	1.123.623.111,73
Jasa Layanan Umum Puskesmas Prapatan	553.331.798,00	604.381.771,36
Jasa Layanan Umum RSUD	57.923.766.513,79	57.592.441.888,35
Hasil Kerjasama RSUD	1.584.380.842,12	2.123.424.906,28
Jasa Layanan Umum Puskesmas Baru Ulu	1.037.825.704,00	1.205.916.345,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Manggar Baru	1.259.751.118,58	1.652.688.362,95
Jasa Layanan Umum Puskesmas Gunung Bahagia	924.692.621,00	1.127.888.837,00
Jasa Layanan Umum UPT Labkesda	1.562.665.663,00	1.543.050.833,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Muara Rapak	683.131.989,07	0,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Gunung Samarinda	793.558.399,00	0,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Batu Ampar	755.862.669,00	0,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Karang Rejo	714.751.408,00	0,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Teritip	559.521.757,00	0,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Baru Ilir	654.565.182,00	0,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Damai	831.194.463,00	0,00
Jasa Layanan Umum Puskesmas Manggar	663.414.167,00	0,00
JUMLAH	88.889.773.649,86	82.981.771.555,08

- h. Pendapatan tak terduga sebesar Rp7.725.180.130,97 merupakan pendapatan yang tidak dapat direncanakan perolehannya dan tidak dapat dikategorikan dalam pendapatan yang telah ditetapkan. Pendapatan tak terduga pada umumnya terdiri atas potongan absen keterlambatan/ketidakhadiran pegawai, denda keterlambatan atas pekerjaan fisik, setoran atas potongan tuntutan ganti rugi, dan lain sebagainya.
- i. Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel sebesar Rp877.933.515,00 merupakan pendapatan atas perjanjian kerjasama *Built, Operate & transfer* antara Pemkot Balikpapan dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 19 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Kontribusi TA 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019
1	2	3
Kontribusi Plaza Muara Rapak	112.500.000,00	125.000.000,00
Kontribusi Plaza Bunsay	75.433.515,00	301.734.060,00
Kontribusi Pasar Baru Square	150.000.000,00	-
Kontribusi Hotel Novotel	420.000.000,00	420.000.000,00
Kontribusi Hotel Ibis	120.000.000,00	120.000.000,00

- j. Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp2.977.690.150,00 merupakan besaran pembayaran kepada FKTP yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp1.534.125.698.889,00 **Rp1.830.196.140.055,00** **Rp1.702.441.251.430,18**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Balikpapan menerima alokasi pendapatan transfer melalui dua entitas yaitu Pemerintah Pusat melalui APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 dan melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pendapatan transfer Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 20 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.534.125.698.889,00	1.830.196.140.055,00	119,30	1.702.441.251.430,18	127.754.888.624,82
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.132.507.129.889,00	1.418.154.115.889,00	125,22	1.061.676.408.488,00	356.477.707.401,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	60.630.542.000,00	71.303.699.000,00	117,60	185.455.780.904,18	(114.152.081.904,18)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	231.193.027.000,00	230.943.325.166,00	99,89	298.759.062.038,00	(67.815.736.872,00)
1.2.4.	Bantuan Keuangan	109.795.000.000,00	109.795.000.000,00	100,00	156.550.000.000,00	(46.755.000.000,00)

Dari tabel sebelumnya dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Transfer pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.534.125.698.889,00 dengan realisasi sebesar Rp1.830.196.140.055,00 yang menandakan kelebihan pencapaian target sebesar 119,30%. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan Rp127.754.888.624,82 dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp1.702.441.251.430,18 atau 7,50%.

5.1.1.2.1. Transfer Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Pemerintah Pusat Rp1.132.507.129.889,00 Rp1.418.154.115.889,00 Rp1.061.676.408.488,00
- Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.132.507.129.889,00 dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.418.154.115.889,00 yang menandakan terdapat kelebihan pencapaian target yang dialokasikan sebesar 125,22%. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp356.477.707.401,00 atau 33,58% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 yang berjumlah sebesar Rp1.061.676.408.488,00. Rincian realisasi tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.132.507.129.889,00	1.418.154.115.889,00	125,22	1.061.676.408.488,00	356.477.707.401,00
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	160.993.754.889,00	147.855.851.617,00	91,84	68.155.340.656,00	79.700.510.961,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	384.515.020.000,00	678.037.692.130,00	176,34	456.723.178.388,00	221.314.513.742,00
1.2.1.03.	Dana Alokasi Umum (DAU)	437.726.788.000,00	429.199.860.000,00	98,05	439.818.664.000,00	(10.618.804.000,00)
1.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	149.271.567.000,00	163.060.712.142,00	109,24	96.979.225.444,00	66.081.486.698,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp160.993.754.889,00	Rp147.855.851.617,00	Rp68.155.340.656,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp160.993.754.889,00 dengan realisasi sebesar Rp147.855.851.617,00 yang menandakan terdapat target yang tidak tercapai berjumlah sebesar 91,84%. Pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp79.700.510.961,00 atau 116,94% dari TA 2019 yang berjumlah Rp68.155.340.656,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Kurang Salur	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	160.993.754.889,00	113.448.572.195,00	34.407.279.422,00	147.855.851.617,00	91,84	68.155.340.656,00
1.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.919.363.000,00	4.707.585.200,00	682.521.599,00	5.390.106.799,00	91,06	7.823.719.456,00
1.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	135.285.895.000,00	108.740.708.995,00	33.724.757.823,00	142.465.466.818,00	105,31	60.331.621.200,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Kurang Salur	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan PPh Pasal 21						
1.2.1.01.05.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	19.788.496.889,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00

5.1.1.2.3. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp384.515.020.000,00 **Rp678.037.692.130,00** **Rp456.723.178.388,00**

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2020 dianggarkan sebesar Rp384.515.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp678.037.692.130,00 yang menandakan terdapat kelebihan pencapaian target sebesar 176,34%. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp221.314.513.742,00 atau 48,46% dari TA 2019 yang berjumlah Rp456.723.178.388,00. Rincian realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Kurang Salur	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	384.515.020.000,00	272.586.611.550,00	405.451.080.580,00	678.037.692.130,00	176,34	456.723.178.388,00
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	6.714.006.000,00	4.006.932.600,00	1.467.984.767,00	5.474.917.367,00	81,54	1.892.971.800,00
1.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	784.599.000,00	3.677.289,00	788.276.289,00	55,58	590.155.800,00
1.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	24.748.936.000,00	16.803.471.400,00	28.913.986.599,00	45.717.457.999,00	184,72	59.321.811.958,00
1.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	80.236.758.000,00	20.982.585.800,00	99.692.902.475,00	120.675.488.275,00	150,40	134.023.484.876,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Kurang Salur	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.02.11.	Bagi Hasil dari Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	271.396.959.000,00	230.009.022.750,00	275.372.529.450,00	505.381.552.200,00	186,21	260.894.753.954,00

5.1.1.2.4. Pendapatan Dana Alokasi Umum **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp437.726.788.000,00 **Rp429.199.860.000,00** **Rp439.818.664.000,00**

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kota Balikpapan memanfaatkan Dana Alokasi Umum seluruhnya untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran gaji ASN dan anggota DPRD. Pada Tahun 2020, Pemerintah Pusat memutuskan kebijakan untuk kegiatan Dana Kelurahan yang bertujuan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan dan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana untuk mendukung kegiatan tersebut ditransfer ke Pemerintah Kota Balikpapan melalui alokasi rekening DAU. Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp437.726.788.000,00 dengan realisasi sebesar Rp429.199.860.000,00 yang menandakan terdapat kekurangan pencapaian target sebesar 98,05%. Realisasi DAU tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(10.618.804.000,00) atau 2,41% dari Tahun 2019 yang berjumlah Rp439.818.664.000,00.

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2020 dan TA 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Tambahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.03.	Dana Alokasi Umum (DAU)	437.726.788.000,00	423.249.860.000,00	5.950.000.000,00	429.199.860.000,00	98,05	439.818.664.000,00
1.2.1.03.01.	Dana Alokasi Umum	437.726.788.000,00	423.249.860.000,00	5.950.000.000,00	429.199.860.000,00	98,05	439.818.664.000,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.04.08.	DAK Bidang Kesehatan	42.664.600.000,00	57.915.666.058,00	135,75	23.084.705.658,00	34.830.960.400,00
1.2.1.04.09.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	808.040.800,00	(808.040.800,00)
1.2.1.04.12.	DAK Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	1.276.208.800,00	(1.276.208.800,00)
1.2.1.04.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	567.138.000,00	(567.138.000,00)
1.2.1.04.14.	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)	0,00	0,00	0,00	15.485.386.634,00	(15.485.386.634,00)
1.2.1.04.18.	DAK Bidang Pendidikan	25.888.161.000,00	21.256.361.000,00	82,11	30.072.466.204,00	(8.816.105.204,00)
1.2.1.04.22.	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.138.396.000,00	2.108.244.379,00	98,59	1.247.238.910,00	861.005.469,00
1.2.1.04.23.	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.740.600.000,00	6.151.879.950,00	224,47	2.024.300.000,00	4.127.579.950,00
1.2.1.04.24.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	72.031.725.000,00	72.031.725.000,00	100,00	0,00	72.031.725.000,00
1.2.1.04.25.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	16.250.000,00	188.000.000,00	1.156,92	0,00	188.000.000,00
1.2.1.04.26.	Dana Pelayanan Kepariwisata	255.870.000,00	255.870.000,00	100,00	0,00	255.870.000,00
1.2.1.04.27.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	417.358.000,00	100,00	0,00	417.358.000,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.04.28.	Dana Pengawasan Obat dan Makanan	275.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2.6. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp60.630.542.000,00 **Rp71.303.699.000,00** **Rp185.455.780.904,18**

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp60.630.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp71.303.699.000,00 yang menandakan terdapat kelebihan pencapaian target anggaran sebesar 117.60%. Pendapatan transfer ini mengalami penurunan sebesar Rp(114.152.081.904,18) atau (61,55)% dari TA 2019 yang berjumlah Rp185.455.780.904,18 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 26 Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian) TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	60.630.542.000,00	71.303.699.000,00	117,60	185.455.780.904,18	(114.152.081.904,18)
1.2.2.03.	Dana Penyesuaian	60.630.542.000,00	71.303.699.000,00	117,60	185.455.780.904,18	(114.152.081.904,18)
1.2.2.03.03.	Dana Insentif Daerah	60.630.542.000,00	71.303.699.000,00	117,60	46.534.186.000,00	24.769.513.000,00
1.2.2.03.07.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	73.499.195.041,00	(73.499.195.041,00)
1.2.2.03.08.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	865.898.000,00	(865.898.000,00)
1.2.2.03.09.	Pendapatan Hibah Dana BOS Sekolah	0,00	0,00	0,00	43.782.619.453,18	(43.782.619.453,18)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
	Dasar					
1.2.2.03.10.	Pendapatan Hibah Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	0,00	20.773.882.410,00	(20.773.882.410,00)

5.1.1.3. Transfer Pemerintah Provinsi **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp340.988.027.000,00 **Rp340.738.325.166,00** **Rp455.309.062.038,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp340.988.027.000,00 dengan realisasi sebesar Rp340.738.325.166,00 sehingga menandakan terdapat kekurangan pencapaian target anggaran senilai 99,93%. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp(114.570.736.872,00) atau (25,16)% dari TA 2019 yang berjumlah Rp455.309.062.038,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 27 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
 TA 2020 dan 2019**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	340.988.027.000,00	340.738.325.166,00	99,93	455.309.062.038,00	(114.570.736.872,00)
1.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	231.193.027.000,00	230.943.325.166,00	99,89	298.759.062.038,00	(67.815.736.872,00)
1.2.4.	Bantuan Keuangan	109.795.000.000,00	109.795.000.000,00	100,00	156.550.000.000,00	(46.755.000.000,00)
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	109.795.000.000,00	109.795.000.000,00	100,00	156.550.000.000,00	(46.755.000.000,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.1.1.3.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp231.193.027.000,00 **Rp230.943.325.166,00** **Rp298.759.062.038,00**

Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi didasari pada Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/5220/1581-III/BPKAD Tanggal 8 September 2020, Perihal: Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:

Tabel 28 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Murni	Kurang Salur	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	231.193.027.000,00	213.571.348.166,00	17.371.977.000,00	230.943.325.166,00	99,89	298.759.062.038,00
1.2.3.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	59.537.773.000,00	56.242.662.000,00	5.614.721.000,00	61.857.383.000,00	103,90	66.432.243.999,00
1.2.3.01.02.	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45.465.330.000,00	37.776.716.000,00	3.453.735.000,00	41.230.451.000,00	90,69	60.338.555.000,00
1.2.3.01.03.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	108.632.596.000,00	95.244.997.000,00	8.237.979.000,00	103.482.976.000,00	95,26	152.295.910.000,00
1.2.3.01.04.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	408.719.000,00	397.748.000,00	65.542.000,00	463.290.000,00	113,35	488.866.001,00
1.2.3.01.05.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	17.148.609.000,00	23.909.225.166,00	0,00	23.909.225.166,00	139,42	19.203.487.038,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp231.193.027.000,00 dengan realisasi sebesar Rp230.943.325.166,00 sehingga menandakan terdapat kekurangan pencapaian target anggaran senilai 99,89%. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp(67.815.736.872,00) atau (22,70)% dari TA 2019 yang berjumlah Rp298.759.062.038,00.

5.1.1.3.2. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp109.795.000.000,00 **Rp109.795.000.000,00** **Rp156.550.000.000,00**

Bantuan Keuangan merupakan dana yang ditransfer dari entitas lain (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) yang peruntukannya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi Kalimantan Timur ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2020 adalah sebesar Rp109.795.000.000,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp(46.755.000.000,00) atau (29,87)% dari TA 2019 yang berjumlah Rp156.550.000.000,00 seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 29 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.4.	Bantuan Keuangan	109.795.000.000,00	109.795.000.000,00	100,00	156.550.000.000,00	(46.755.000.000,00)
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	109.795.000.000,00	109.795.000.000,00	100,00	156.550.000.000,00	(46.755.000.000,00)
1.2.4.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	109.795.000.000,00	109.795.000.000,00	100,00	156.550.000.000,00	(46.755.000.000,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
		Rp78.971.300.000,00	Rp76.254.706.805,72	Rp3.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah Dana BOS SD dan SMP, serta Pendapatan Hibah dari Masyarakat. Adapun penjelasan singkat mengenai Pendapatan Hibah tersebut yaitu:

- Pendapatan Hibah Dari Pemerintah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat bekerjasama dengan AusAID kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk Penyertaan Modal kepada PDAM untuk pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) demi ketersediaan air bersih.
- Pendapatan Hibah BOS Sekolah Dasar merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kota Balikpapan.
- Pendapatan Hibah BOS Sekolah Menengah Pertama merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Balikpapan.
- Pendapatan Hibah Dari Masyarakat merupakan Pendapatan yang diperoleh dari sumbangsih masyarakat dalam rangka penanganan *corona virus disease* - 19.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp78.971.300.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp76.254.706.805,72 atau 96,56% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp73.254.706.805,72 dari TA 2019 yang berjumlah Rp3.000.000.000,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.971.300.000,00	76.254.706.805,72	96,56	3.000.000.000,00	73.254.706.805,72
1.3.1.	Pendapatan Hibah	78.971.300.000,00	76.254.706.805,72	96,56	3.000.000.000,00	73.254.706.805,72
1.3.1.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	10.000.000.000,00	6.960.000.000,00	69,60	3.000.000.000,00	3.960.000.000,00
1.3.1.06.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS Sekolah Dasar	47.519.100.000,00	47.350.934.021,00	99,65	0,00	47.350.934.021,00
1.3.1.06.02.	Pendapatan Hibah Dana BOS Sekolah Menengah	21.452.200.000,00	21.660.224.546,00	100,97	0,00	21.660.224.546,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

belanja subsidi. Pada Tahun 2020 Belanja Operasi dianggarkan Rp1.808.667.655.006,53 dan dapat direalisasikan Rp1.594.807.894.013,19 atau 88,18%. Realisasi belanja operasional bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp(120.876.440.138,12) atau (7,05)% seperti yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 32 Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	BELANJA OPERASI	1.808.667.655.006,53	1.594.807.894.013,19	88,18	1.715.684.334.151,31	(120.876.440.138,12)	(7,05)
2.1.1.	Belanja Pegawai	779.157.305.545,53	698.670.023.957,31	89,67	749.792.529.225,34	(51.122.505.268,03)	(6,82)
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	849.560.824.461,00	737.162.177.596,66	86,77	847.941.624.611,97	(110.779.447.015,31)	(13,06)
2.1.4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
2.1.5.	Belanja Hibah	134.263.900.000,00	119.747.002.459,22	89,19	114.721.353.514,00	5.025.648.945,22	4,38
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	45.685.625.000,00	39.228.690.000,00	85,87	2.228.826.800,00	36.999.863.200,00	1.660,06

Rincian belanja operasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp779.157.305.545,53 **Rp698.670.023.957,31** **Rp749.792.529.225,34**

Realisasi Belanja Pegawai merupakan realisasi belanja gaji, tunjangan Pegawai Negeri Sipil, penerimaan Kepala Daerah dan Anggota DPRD, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta Uang Lembur di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pada Tahun 2020 Belanja Pegawai dianggarkan senilai Rp779.157.305.545,53 dan direalisasikan sebesar Rp698.670.023.957,31 atau 89,67%. Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(51.122.505.268,03) atau (6,82)% dari TA 2019. Rincian realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.	Belanja Pegawai	779.157.305.545,53	698.670.023.957,31	89,67	749.792.529.225,34	(51.122.505.268,03)
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	360.633.242.308,00	332.231.122.820,00	92,12	333.769.435.726,40	(1.538.312.906,40)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	373.865.287.237,53	330.753.859.088,00	88,47	372.017.153.335,00	(41.263.294.247,00)
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	15.757.380.000,00	15.408.860.000,00	97,79	15.403.600.000,00	5.260.000,00
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	24.602.512.000,00	16.713.936.049,31	67,94	24.367.328.163,94	(7.653.392.114,63)
2.1.1.07.	Uang Lembur	4.298.884.000,00	3.562.246.000,00	82,86	4.235.012.000,00	(672.766.000,00)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp332.231.122.820,00 merupakan belanja atas gaji dan tunjangan yang melekat pada PNS dan anggota DPRD di lingkungan Pemkot Balikpapan.
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp330.753.859.088,00 terdiri atas Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp69.334.527.835,00, Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp721.000.000,00, Tunjangan Guru Kementerian Agama sebesar 531.300.000,00, dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Capaian Kinerja PNS sebesar Rp260.167.031.253,00.
- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp15.408.860.000,00 merupakan berbagai tunjangan dan dana operasional yang diterima Anggota DPRD dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.
- Insentif Pemungutan Pajak Daerah merupakan insentif yang diperoleh PNS BPPDRD atas pungutan pajaknya. Dari rincian tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah hanya terealisasi sebesar Rp16.713.936.049,31 atau 67,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp24.602.512.000,00 karena berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 10 bahwa besaran insentif ditetapkan melalui APBD TA berkenaan. Penganggaran insentif di triwulan IV yang dianggarkan di tahun berjalan direalisasikan di triwulan I TA berikutnya.
- Uang Lembur merupakan insentif yang diberikan pada pegawai Non PNS di OPD Dinas Lingkungan Hidup, UPT Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perumahan dan Permukiman atas pekerjaan tambahan di luar jam kerja.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp849.560.824.461,00 Rp737.162.177.596,66 Rp847.941.624.611,97

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp849.560.824.461,00 dan direalisasikan sebesar



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Rp737.162.177.596,66 atau 86,77 %. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD selama tahun berjalan. Realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(110.779.447.015,31) atau (13,06)% dari tahun sebelumnya. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	849.560.824.461,00	737.162.177.596,66	86,77	847.941.624.611,97	(110.779.447.015,31)
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.010.748.138,00	32.324.397.910,60	85,04	31.902.871.164,00	421.526.746,60
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.366.576.850,00	23.700.050.043,70	89,89	27.888.028.314,68	(4.187.978.270,98)
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.496.110.159,00	87.029.625.121,18	82,50	81.048.067.142,00	5.981.557.979,18
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	8.790.228.000,00	6.950.079.000,00	79,07	3.853.830.250,00	3.096.248.750,00
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.763.294.250,00	36.983.445.168,20	75,84	37.665.080.119,00	(681.634.950,80)
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.826.417.800,00	11.208.276.450,00	81,06	14.028.236.005,00	(2.819.959.555,00)
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.176.727.800,00	1.037.141.300,00	88,14	1.701.275.598,00	(664.134.298,00)
2.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.069.698.920,00	1.794.823.999,00	86,72	1.534.210.800,00	260.613.199,00
2.1.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	4.340.066.900,00	4.334.390.814,46	99,87	3.506.807.662,37	827.583.152,09
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.604.430.300,00	4.878.994.074,00	87,06	6.027.655.863,00	(1.148.661.789,00)
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.990.137.520,00	46.205.037.231,00	73,35	76.857.075.952,95	(30.652.038.721,95)
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.559.824.500,00	2.366.189.250,00	66,47	2.593.180.599,00	(226.991.349,00)
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.973.498.750,00	2.800.458.450,00	94,18	6.219.117.310,00	(3.418.658.860,00)
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus	2.915.543.500,00	2.550.783.500,00	87,49	3.753.910.850,00	(1.203.127.350,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
	dan hari-hari tertentu					
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.525.492.854,00	47.750.665.140,24	94,51	80.760.171.635,87	(33.009.506.495,63)
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	50.668.674.848,00	46.985.105.617,11	92,73	89.420.683.822,47	(42.435.578.205,36)
2.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	3.740.677.522,00	2.416.604.350,00	64,60	4.080.407.720,00	(1.663.803.370,00)
2.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.207.112.390,00	6.245.767.586,40	67,84	4.893.870.024,56	1.351.897.561,84
2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	312.850.000,00	268.769.000,00	85,91	200.378.203,00	68.390.797,00
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.154.252.540,00	2.887.908.812,00	91,56	5.565.661.423,00	(2.677.752.611,00)
2.1.2.25.	Honorarium PNS	2.673.850.000,00	2.102.575.000,00	78,63	2.724.685.000,00	(622.110.000,00)
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	203.363.428.838,00	189.311.943.269,66	93,09	173.327.214.180,35	15.984.729.089,31
2.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.493.462.500,00	5.077.821.967,00	78,20	14.723.740.000,00	(9.645.918.033,00)
2.1.2.28.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	544.960.300,00	401.863.521,00	73,74	5.853.018.530,00	(5.451.155.009,00)
2.1.2.29.	Belanja Barang Dana Bos	61.552.266.244,00	51.746.163.326,00	84,07	49.219.198.898,00	2.526.964.428,00
2.1.2.31.	Belanja Barang KAPITASI JKN	1.171.332.951,00	733.127.941,64	62,59	3.322.794.319,31	(2.589.666.377,67)
2.1.2.34.	Belanja Jasa Berlangganan	773.221.500,00	608.415.717,00	78,69	304.988.598,00	303.427.119,00
2.1.2.36.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	703.891.000,00	587.873.768,00	83,52	471.234.584,00	116.639.184,00
2.1.2.37.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.952.345.366,00	23.212.674.261,49	291,90	3.964.427.730,80	19.248.246.530,69
2.1.2.39.	Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	6.910.600.000,00	4.784.127.994,03	69,23	3.660.293.534,34	1.123.834.459,69
2.1.2.40.	Belanja Pengadaan Alat-	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	(1.140.000,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
	alat Ukur					
2.1.2.41.	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	239.663.500,00	234.318.100,00	97,77	49.490.000,00	184.828.100,00
2.1.2.42.	Belanja Barang Perlengkapan Dapur	148.356.125,00	135.252.895,00	91,17	211.304.360,00	(76.051.465,00)
2.1.2.43.	Belanja Penyelesaian Perkara Hukum	372.500.000,00	279.000.000,00	74,90	212.000.000,00	67.000.000,00
2.1.2.44.	Belanja Kontribusi Lomba	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)
2.1.2.45.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	5.372.822.000,00	3.966.403.900,00	73,82	2.644.834.250,00	1.321.569.650,00
2.1.2.46.	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	10.086.647.000,00	7.779.281.361,00	77,12	20.260.713.983,20	(12.481.432.622,20)
2.1.2.47.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	8.817.727.241,00	4.872.057.168,26	55,25	4.771.475.038,76	100.582.129,50
2.1.2.48.	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	979.662.900,00	885.286.568,00	90,37	2.841.620.535,00	(1.956.333.967,00)
2.1.2.49.	Belanja bahan Perlengkapan Kamar	65.430.000,00	54.707.000,00	83,61	24.092.000,00	30.615.000,00
2.1.2.50.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	109.375.000,00	99.466.200,00	90,94	13.095.000,00	86.371.200,00
2.1.2.53.	Belanja Pengadaan Alat-alat perbengkelan	12.350.000,00	0,00	0,00	9.150.250,00	(9.150.250,00)
2.1.2.54.	Belanja Jasa Perizinan	6.300.000,00	4.748.592,00	75,37	4.748.592,00	0,00
2.1.2.56.	Belanja Barang Alat Kesehatan	19.095.855,00	18.980.060,00	99,39	138.674.250,00	(119.694.190,00)
2.1.2.57.	Belanja Pengurusan Surat-Surat Kendaraan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.58.	Belanja Barang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas /jalan	0,00	0,00	0,00	330.859.774,23	(330.859.774,23)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Dari rincian tabel realisasi belanja hibah di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp8.769.684.060,22 terdiri atas hibah kepada masyarakat sebesar Rp87.684.060,22 yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi covid-19 dimana dana tersebut diperoleh melalui sumbangan-sumbangan yang ditampung dalam rekening gugus tugas penanggulangan dan pencegahan pandemi covid-19, Hibah kepada Anggota Masyarakat Bidang/Sektor Pendidikan (Dewan Pendidikan) sebesar Rp150.000.000,00, Insentif Guru Sekolah Swasta sebesar Rp7.928.000.000,00, dan Insentif Guru MTs sebesar Rp604.000.000,00.
- b. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp74.443.314.021,00 diperuntukkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi yang bergerak diberbagai bidang di Kota Balikpapan. Belanja hibah ini terdiri atas Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Kependidikan sebesar Rp1.900.000.000,00, kepada Organisasi Kemasyarakatan Kesehatan sebesar Rp2.800.000.000,00, kepada Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp5.000.000.000,00, kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sebesar Rp2.510.000.000,00, kepada Organisasi Kemasyarakatan Kesenian dan Kebudayaan/ Adat Istiadat sebesar Rp50.000.000,00, kepada Organisasi Kemasyarakatan Profesi sebesar Rp280.898.521,00, kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp2.700.000.000,00, dan kepada Instansi Vertikal sebesar Rp59.202.415.500,00.
- c. Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp36.534.004.378,00 terdiri atas belanja hibah BOSDA untuk SD dan SMP Swasta sebesar Rp29.358.304.378,00, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Swasta sebesar Rp6.802.600.000,00, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp373.100.000,00.

5.1.2.1.5. Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Bantuan Sosial	Rp45.685.625.000,00	Rp39.228.690.000,00	Rp2.228.826.800,00

Belanja Bantuan Sosial diperuntukkan bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Pada Tahun 2020 bantuan sosial direalisasikan sebesar Rp39.228.690.000,00 atau 85,87% dari nilai anggaran sebesar Rp45.685.625.000,00. Realisasi bantuan sosial mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp36.999.863.200,00 dari realisasi TA 2019 yang berjumlah sebesar Rp2.228.826.800,00, kenaikan yang cukup signifikan tersebut terjadi karena pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Balikpapan memberikan bantuan langsung tunai tahap V, VI dan VII sebesar Rp38.755.890.000,00 yang tahap sebelumnya dibagikan melalui dana tak terduga kepada segenap masyarakat Kota Balikpapan yang terdampak Covid-19. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 37 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	45.685.625.000,00	39.228.690.000,00	85,87	2.228.826.800,00	36.999.863.200,00
2.1.6.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.245.625.000,00	472.800.000,00	14,57	2.228.826.800,00	(1.756.026.800,00)
2.1.6.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	42.440.000.000,00	38.755.890.000,00	91,32	0,00	38.755.890.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp438.747.833.933,38 Rp428.692.685.694,51 Rp687.770.681.357,02

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya Pemerintah Kota Balikpapan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pada Tahun 2020 belanja modal dianggarkan sebesar Rp438.747.833.933,38 dan direalisasikan sebesar Rp428.692.685.694,51 atau 97,71%. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(259.077.995.662,51) atau 37,67% dibandingkan dengan TA 2019 dengan pada tabel berikut.

Tabel 38 Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	BELANJA MODAL	438.747.833.933,38	428.692.685.694,51	97,71	687.770.681.357,02	(259.077.995.662,51)
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	9.282.243.600,00	48.900.000,00	0,53	13.023.016.543,24	(12.974.116.543,24)
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.176.918.970,00	65.713.984.207,21	93,64	92.286.750.125,68	(26.572.765.918,47)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.762.252.462,58	75.077.627.280,00	134,64	136.068.318.925,39	(60.990.691.645,39)
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.676.472.466,80	260.738.034.953,11	97,05	415.921.306.815,97	(155.183.271.862,86)
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.257.968.084,00	26.640.039.254,19	77,76	29.376.833.846,74	(2.736.794.592,55)
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	591.978.350,00	474.100.000,00	80,09	1.094.455.100,00	(620.355.100,00)

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp9.282.243.600,00	Rp48.900.000,00	Rp13.023.016.543,24

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp9.282.243.600,00 dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp48.900.000,00 atau 0,53% yang menandakan terdapat penurunan sebesar Rp(12.974.116.543,24) atau (99,62)% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp13.023.016.543,24 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 39 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	9.282.243.600,00	48.900.000,00	0,53	13.023.016.543,24	(12.974.116.543,24)
2.2.1.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	0,00	0,00	0,00	587.143.575,24	(587.143.575,24)
2.2.1.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	76.400.000,00	0,00	0,00	8.851.562.000,00	(8.851.562.000,00)
2.2.1.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan	9.205.843.600,00	48.900.000,00	0,53	3.584.310.968,00	(3.535.410.968,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.183.741.000,00	1.087.591.454,00	91,88	1.902.041.650,00	(814.450.196,00)
2.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.807.010.080,00	4.569.451.100,00	95,06	28.617.124.139,23	(24.047.673.039,23)
2.2.2.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.214.000,00	(4.214.000,00)
2.2.2.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	276.030.000,00	268.274.500,00	97,19	289.008.500,00	(20.734.000,00)
2.2.2.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	46.750.000,00	45.768.800,00	97,90	21.276.560,00	24.492.240,00
2.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	664.780.000,00	547.078.060,00	82,29	178.380.450,00	368.697.610,00
2.2.2.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	128.850.000,00	125.530.000,00	97,42	1.219.467.880,00	(1.093.937.880,00)
2.2.2.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	149.140.000,00	134.062.500,00	89,89	254.597.500,00	(120.535.000,00)
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.420.550.000,00	2.255.478.600,00	93,18	2.749.750.745,00	(494.272.145,00)
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.124.993.400,00	31.028.180.844,77	96,59	16.341.589.872,50	14.686.590.972,27



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	8.378.690.290,00	8.066.102.706,00	96,27	18.328.770.774,00	(10.262.668.068,00)
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.836.610.000,00	3.691.899.400,00	96,23	12.616.066.013,00	(8.924.166.613,00)
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.028.156.000,00	978.845.100,00	95,20	1.593.993.245,00	(615.148.145,00)
2.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	210.735.000,00	192.891.505,00	91,53	280.838.970,00	(87.947.465,00)
2.2.2.20.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	200.000.000,00	198.660.000,00	99,33	0,00	198.660.000,00
2.2.2.21.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	11.503.802.297,00	9.952.910.735,44	86,52	1.622.836.950,95	8.330.073.784,49
2.2.2.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	157.487.550,00	140.347.550,00	89,12	785.899.224,00	(645.551.674,00)
2.2.2.23.	Belanja modal Pengadaan Unit- Unit Laboratorium	1.560.983.003,00	1.414.577.292,00	90,62	573.798.249,00	840.779.043,00
2.2.2.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	455.400.000,00	201.757.000,00	44,30	0,00	201.757.000,00
2.2.2.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	655.879.550,00	636.659.260,00	97,07	834.399.400,00	(197.740.140,00)
2.2.2.36.	Belanja Modal Pengadaan Sarana/	325.330.800,00	123.679.000,00	38,02	748.914.033,00	(625.235.033,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
	Bersejarah					
2.2.3.07.	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	77.659.800,00	(77.659.800,00)
2.2.3.09.	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.000.000,00	0,00	0,00	94.097.940,81	(94.097.940,81)
2.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	273.800.000,00	252.386.185,00	92,18	596.171.675,00	(343.785.490,00)
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Taman serta Sarana dan Prasarananya	540.627.097,06	524.377.447,06	96,99	4.241.486.409,19	(3.717.108.962,13)
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Pemakaman	19.494.000,00	19.448.000,00	99,76	1.175.435.061,64	(1.155.987.061,64)
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Pendukung Bangunan	24.050.306.102,00	45.420.857.959,78	188,86	17.623.835.201,56	27.797.022.758,22
2.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pariwisata	1.965.487.364,00	1.965.487.364,00	100,00	1.405.854.990,19	559.632.373,81
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pengolahan Sampah	390.044.420,00	344.514.241,23	88,33	1.312.323.676,59	(967.809.435,36)
2.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan	257.516.000,00	253.669.672,00	98,51	350.566.000,00	(96.896.328,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
	Kemasyarakatan					

5.1.2.2.4. Belanja Modal Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp268.676.472.466,80 Rp260.738.034.953,11 Rp415.921.306.815,97

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp268.676.472.466,80 dan direalisasikan sebesar Rp260.738.034.953,11 atau 97,05% yang menandakan terdapat penurunan sebesar Rp(155.183.271.862,86) atau (37,31)% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp415.921.306.815,97 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 42 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.676.472.466,80	260.738.034.953,11	97,05	415.921.306.815,97	(155.183.271.862,86)
2.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	169.744.193.387,74	168.826.525.016,30	99,46	315.037.295.160,58	(146.210.770.144,28)
2.2.4.02.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	2.524.731.314,00	2.458.276.990,00	97,37	2.536.083.698,95	(77.806.708,95)
2.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	213.475.800,00	(213.475.800,00)
2.2.4.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	442.200.000,00	(442.200.000,00)
2.2.4.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	66.605.720.265,06	61.939.665.887,25	92,99	65.932.341.762,24	(3.992.675.874,99)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 43 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.257.968.084,00	26.640.039.254,19	77,76	29.376.833.846,74	(2.736.794.592,55)
2.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	175.000.000,00	174.971.471,00	99,98	85.886.900,00	89.084.571,00
2.2.5.03.	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	25.000.000,00	24.200.000,00	96,80	157.854.000,00	(133.654.000,00)
2.2.5.04.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	158.219.300,00	157.499.300,00	99,54	161.723.000,00	(4.223.700,00)
2.2.5.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga lainnya	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)
2.2.5.07.	Belanja modal Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	97.240.000,00	(97.240.000,00)
2.2.5.16.	Belanja Modal BLUD RSKBSI	9.001.574.319,00	521.408.097,00	5,79	1.159.577.487,00	(638.169.390,00)
2.2.5.17.	Belanja Modal BLUD Puskesmas.	2.504.621.350,00	1.809.073.092,60	72,23	1.252.767.660,00	556.305.432,60
2.2.5.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan	30.000.000,00	25.960.000,00	86,53	93.018.750,00	(67.058.750,00)
2.2.5.20.	Belanja Modal BLUD RSUD	1.668.487.500,00	1.429.287.920,50	85,66	2.257.163.240,00	(827.875.319,50)
2.2.5.21.	Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud	12.726.904.050,00	11.855.130.766,63	93,15	18.532.544.979,50	(6.677.414.212,87)
2.2.5.22.	Belanja Modal Dana BOS	6.874.073.456,00	9.643.744.792,00	140,29	4.129.360.849,74	5.514.383.942,26



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.5.23.	Belanja Modal BLUD Unit Pelaksana Teknis (UPT)	628.774.100,00	570.279.000,00	90,70	309.570.800,00	260.708.200,00
2.2.5.24.	Belanja Modal Kapitasi JKN	465.314.009,00	428.484.814,46	92,09	1.121.126.180,50	(692.641.366,04)

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp591.978.350,00 **Rp474.100.000,00** **Rp1.094.455.100,00**

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengadaan *software*/aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp591.978.350,00 dan direalisasikan sebesar Rp474.100.000,00 atau 80,09% yang menandakan terdapat penurunan sebesar Rp(620.355.100,00) atau (56,68)% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.094.455.100,00.

Tabel 44 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	591.978.350,00	474.100.000,00	80,09	1.094.455.100,00	(620.355.100,00)
2.2.6.05.	Aset Lain-lain	591.978.350,00	474.100.000,00	80,09	1.094.455.100,00	(620.355.100,00)
2.2.6.05.01.	Aset Lain-lain.	591.978.350,00	474.100.000,00	80,09	1.094.455.100,00	(620.355.100,00)

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp145.000.000.000,00 **Rp120.435.934.469,68** **Rp1.865.726.154,00**

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp145.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp120.435.934.469,68. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi Belanja Tidak terduga sebesar Rp120.435.934.469,68 terdiri atas



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Belanja penanggulangan covid-19 sebesar Rp120.421.985.933,68 dan pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB sebesar Rp3.291.400,00, pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB sebesar Rp6.817.136,00, pengembalian potongan absen pada Dishub sebesar Rp765.000,00 dan pengembalian dana pemakaian gedung kesenian sebesar Rp3.075.000,00.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan dana ke dalam belanja tak terduga sebesar Rp136.991.767.700,00 yang diperoleh melalui hasil *refocusing* APBD semula dan direalisasikan sebesar Rp120.421.985.933,68. Realisasi tersebut digunakan oleh beberapa OPD terkait langsung dalam penanggulangan pandemi Covid untuk fokus penanganan kesehatan, fokus penanganan dampak ekonomi dan fokus jaring pengaman sosial. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 menunjukkan kenaikan sebesar Rp118.570.208.315,68 atau 6.355,18%.

Tabel 45 Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.01.01.	Belanja Tak Terduga	145.000.000.000,00	120.435.934.469,68	83,06	1.865.726.154,00	118.570.208.315,68

Rincian alokasi dan peruntukan realisasi penggunaan Dana Belanja Tak Terduga dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46 Rincian realisasi Belanja penanganan Covid-19 sesuai peruntukannya

Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3
A. Belanja Tidak Terduga (BTT)	136.991.767.700,00	120.421.985.933,68
1. Bidang Kesehatan	62.247.767.700,00	50.137.118.766,68
a. Alkes	9.121.544.160,00	5.972.058.358,00
b. Obat-obatan	572.100.000,00	488.697.005,82
c. Habis Pakai/Material Kesehatan	16.684.757.800,00	13.591.628.777,00
d. Insentif Tenaga Kesehatan	6.280.000.000,00	3.660.946.618,00
e. Lainnya	29.589.365.740,00	26.423.788.007,86
2. Bidang Sosial	74.144.000.000,00	69.693.961.617,00
a. Bantuan Tunai	36.367.690.000,00	34.086.770.000,00
b. Dapur Umum	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3
c. Lainnya	37.776.310.000,00	35.607.191.617,00
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	600.000.000,00	590.905.550,00
a. Bantuan UMKM	400.000.000,00	399.241.000,00
b. Insentif Usaha	0,00	0,00
c. Lainnya	200.000.000,00	191.664.550,00

Sedangkan rincian alokasi dan peruntukan realisasi penggunaan Dana Belanja Tak Terduga secara lebih detail per pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1*.

5.1.3 TRANSFER

5.1.3.1. Transfer/Bantuan Keuangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp1.300.000.000,00	Rp1.271.220.600,00	Rp3.141.232.527,00

Transfer Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.271.220.600,00 atau 97,79%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 menunjukkan penurunan sebesar Rp(1.870.011.927,00) atau (59,53)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
3.	TRANSFER	1.300.000.000,00	1.271.220.600,00	97,79	3.141.232.527,00	(1.870.011.927,00)
3.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.300.000.000,00	1.271.220.600,00	97,79	3.141.232.527,00	(1.870.011.927,00)
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
3.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.300.000.000,00	1.271.220.600,00	97,79	1.141.232.527,00	129.988.073,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.1.3.1.1. Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.000.000.000,00

Pemerintah Kota Balikpapan tidak mengalokasikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2020.

5.1.3.1.2. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2019
	Rp1.300.000.000,00	Rp1.271.220.600,00	Rp1.141.232.527,00

Transfer/Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan bantuan Pemerintah Kota Balikpapan kepada sebelas partai politik di Balikpapan yang dialokasikan berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.271.220.600,00 atau 97,79%. Realisasi transfer bantuan keuangan TA 2020 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 menunjukkan kenaikan sebesar Rp129.988.073,00 atau 11,39%. Rincian penerima bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 48 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
TA 2020 dan 2019**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
3.2.3.01.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000,00	1.271.220.600,00	97,79	1.141.232.527,00	129.988.073,00
3.2.3.01.02.	Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	295.696.180,00	292.818.240,00	99,03	283.027.507,00	9.790.733,00
3.2.3.01.03.	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	118.509.924,00	115.631.984,00	97,57	106.701.192,00	8.930.792,00
3.2.3.01.04.	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	152.881.560,00	150.003.620,00	98,12	113.390.386,00	36.613.234,00
3.2.3.01.05.	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia	218.116.600,00	215.238.660,00	98,68	176.494.743,00	38.743.917,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
	Perjuangan					
3.2.3.01.07.	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	91.310.856,00	88.432.916,00	96,85	81.098.767,00	7.334.149,00
3.2.3.01.08.	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	155.194.364,00	152.316.424,00	98,15	140.337.496,00	11.978.928,00
3.2.3.01.09.	Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	90.049.700,00	87.171.760,00	96,80	100.522.760,00	(13.351.000,00)
3.2.3.01.13.	Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang	0,00	0,00	0,00	31.486.451,00	(31.486.451,00)
3.2.3.01.15.	Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat	77.512.084,00	74.634.144,00	96,29	76.515.608,00	(1.881.464,00)
3.2.3.01.16.	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia	38.498.408,00	35.620.468,00	92,52	11.873.489,00	23.746.979,00
3.2.3.01.17.	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	62.230.324,00	59.352.384,00	95,38	19.784.128,00	39.568.256,00

5.1.4. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp(309.099.136.437,91) Rp370.300.752.986,76 Rp61.066.518.481,90

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh surplus anggaran senilai Rp370.300.752.986,76 atau (119,80)% dari defisit yang dianggarkan di APBD sebesar Rp(309.099.136.437,91).



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.1.5. PEMBIAYAAN **Anggaran 2020** **Realisasi 2019** **Realisasi 2019**
Rp309.099.136.437,91 **Rp309.171.718.088,05** **Rp262.765.199.606,15**

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.5.1. Penerimaan **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Pembiayaan **Rp323.831.718.088,00** **Rp323.831.718.088,05** **Rp291.631.786.428,55**

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp323.831.718.088,05 terdiri atas penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya sebesar Rp323.831.718.088,05.

Tabel 49 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Penggunaan SiLPA	323.831.718.088,00	323.831.718.088,05	100,00	291.631.786.428,55
Jumlah		323.831.718.088,00	323.831.718.088,05	100,00	291.631.786.428,55

5.1.5.2. Pengeluaran **Anggaran 2020** **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Pembiayaan **Rp14.732.581.650,09** **Rp14.660.000.000,00** **Rp28.866.586.822,40**

Pengeluaran Pembiayaan merupakan investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp14.732.581.650,09 dan direalisasikan senilai Rp14.660.000.000,00 atau 99,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp(14.206.586.822,40) atau (49,21)%. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 50 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	14.732.581.650,09	14.660.000.000,00	99,51	28.866.586.822,40	(14.206.586.822,40)
4.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada PDAM	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	16.736.586.822,40	(6.736.586.822,40)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2.02.02.	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah	4.665.000.000,00	4.660.000.000,00	99,89	12.130.000.000,00	(7.470.000.000,00)
4.2.2.02.03.	Penyertaan Modal Pada Perusda	67.581.650,09	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.5.3. Pembiayaan Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Netto Rp309.099.136.437,91 Rp309.171.718.088,05 Rp262.765.199.606,15

Dalam pelaksanaan APBD TA 2020, realisasi pembiayaan netto adalah sebesar Rp309.171.718.088,05 atau 100,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp309.099.136.437,91. Pembiayaan netto merupakan hasil dari pengurangan penerimaan pembiayaan sebesar Rp323.831.718.088,05 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14.660.000.000,00.

5.1.6 SISA LEBIH ANGGARAN (SiLPA) Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp0,00 Rp679.472.471.074,81 Rp323.831.718.088,05

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun berkenaan sebesar Rp679.472.471.074,81 merupakan selisih realisasi pendapatan yang tidak tercapai dengan penghematan belanja daerah dan pembiayaan dengan rincian perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 51 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan	2.084.616.352.502,00	2.515.508.487.764,14	2.469.528.492.671,23
Belanja dan Transfer	2.393.715.488.939,91	2.145.207.734.777,38	2.408.461.974.189,33
Surplus/(Defisit)	(309.099.136.437,91)	370.300.752.986,76	61.066.518.481,90



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4
Pembiayaan Netto	309.099.136.437,91	309.171.718.088,05	262.765.199.606,15
SILPA	0,00	679.472.471.074,81	323.831.718.088,05

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp679.472.471.074,81 juga dapat dilihat melalui sumber kasnya dengan rincian perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 52 Rincian SiLPA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Kas Di Kas Daerah	607.178.376.440,27
2.	Investasi Jangka Pendek (Deposito)	0,00
3.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.655.318.916,00
4.	Kas Di Bendahara Penerimaan	34.545.908,00
5.	Kas Di BLUD	52.059.825.643,74
6.	Setara Kas	0,00
7.	Kas Lainnya	14.544.404.166,80
	Total	679.472.471.074,81

PENGUNGKAPAN LAINNYA MENGENAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dari seluruh uraian mengenai Laporan Realisasi Anggaran di atas, perlu dijelaskan lebih terinci bahwa terdapat anggaran beberapa kegiatan yang dialokasikan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Kegiatan yang dialokasikan setelah penetapan Perda Perubahan APBD TA 2020 tersebut terdapat pada OPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

a. Pada OPD Dinas Kesehatan kegiatan yang dialokasikan tersebut adalah :

1) BOK Tambahan 1

BOK Tambahan 1 merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dialokasikan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp4.670.814.115,00 sesuai Keputusan Menteri



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kuungan RI Nomor: 25/ KM.7/2020 tanggal 13 November 2020 Tentang: Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020.

2) BOK Tambahan 2

Pemerintah Kota Balikpapan kembali menerima alokasi dana untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan sebesar Rp12.706.185.699,00 sesuai surat rekomendasi Plt. Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Pemberitahuan terhadap alokasi tersebut diperoleh setelah proses penyusunan Perda Perubahan APBD berlangsung sehingga tidak dapat diakomodir pada Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

b. Pada OPD Dinas Pekerjaan Umum kegiatan yang dialokasikan tersebut adalah :

- 1) Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase III, dengan alokasi dana sebesar Rp105.000.000,00 dimana kegiatan tersebut dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Drainase/Saluran Air.
- 2) Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase IV, dengan alokasi dana sebesar Rp308.000.000,00. Kegiatan tersebut dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Drainase/Saluran Air serta Belanja Modal Pengadaan Dokumen Supervisi.
- 3) Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase V, dengan alokasi dana sebesar Rp580.000.000,00. Kegiatan tersebut dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Drainase/Saluran Air.
- 4) Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan Dan Jembatan IV, dengan alokasi dana sebesar Rp6.752.647.000,00. Kegiatan tersebut dialokasikan untuk Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota serta Belanja Modal Pengadaan Bangunan Siring.
- 5) Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan Dan Jembatan V, dengan alokasi dana sebesar Rp9.687.083.280,00. Kegiatan tersebut dialokasikan untuk Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota, Belanja Modal Pengadaan Pagar/ Pembatas serta Belanja Modal Pengadaan Bangunan Siring.
- 6) Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan Dan Jembatan VI, dengan alokasi dana sebesar Rp11.559.221.000,00. Kegiatan tersebut dialokasikan untuk Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota serta Belanja Modal Pengadaan Bangunan Siring.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 166 ayat (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran-pengeluaran ini juga didasarkan pada Keputusan Wali Kota Balikpapan tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tanah Longsor dan Banjir pada Beberapa Lokasi di Wilayah Kota Balikpapan dan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

jasanya mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Informasi terkait kegiatan yang dialokasikan setelah Perubahan APBD TA 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 53 Daftar Kegiatan Yang Dialokasikan Setelah Perubahan APBD TA 2020

No.	Nama Kegiatan	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7
Total Dana			50.936.451.094,00	50.657.158.507,00	279.292.587,00	
1	BOK INSENTIF TENAGA KESEHATAN COVID19 (DAK TAMBAHAN 2020)		21.944.499.814,00	21.742.233.727,00	202.266.087,00	Dinas Kesehatan
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Penanganan Covid 19	17.376.999.814,00	21.944.499.814,00	21.742.233.727,00	202.266.087,00	
	Ket: Dana yang dialokasikan setelah P-APBD sebesar Rp17.376.999.814,00					
2	TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE III		105.000.000,00	102.000.000,00	3.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Belanja Modal Pengadaan Drainase/Saluran Air		105.000.000,00	102.000.000,00	3.000.000,00	
3	TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE IV		308.000.000,00	272.125.500,00	35.874.500,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Belanja Modal Pengadaan		270.000.000,00	239.549.000,00	30.451.000,00	



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kegiatan	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7
	Drainase/Saluran Air					
	- Belanja Modal Pengadaan Dokumen Supervisi		38.000.000,00	32.576.500,00	5.423.500,00	
4	TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE V		580.000.000,00	541.848.000,00	38.152.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Belanja Modal Pengadaan Drainase/Saluran Air		580.000.000,00	541.848.000,00	38.152.000,00	
5	TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN IV		6.752.647.000,00	6.752.647.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota		2.858.480.000,00	2.858.480.000,00	0,00	
	- Belanja modal Pengadaan Bangunan Siring		3.894.167.000,00	3.894.167.000,00	0,00	
6	TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN V		9.687.083.280,00	9.687.083.280,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota		749.177.000,00	749.177.000,00	0,00	
	- Belanja Modal Pengadaan		938.765.360,00	938.765.360,00	0,00	



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kegiatan	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7
	Pagar/Pembatas					
	- Belanja modal Pengadaan Bangunan Siring		7.999.140.920,00	7.999.140.920,00	0,00	
7	TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN VI		11.559.221.000,00	11.559.221.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota		2.344.880.000,00	2.344.880.000,00	0,00	
	- Belanja modal Pengadaan Bangunan Siring		9.214.341.000,00	9.214.341.000,00	0,00	

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu TA dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA TA yang lalu dan TA yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 54 Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
1	2	3
Saldo Anggaran Lebih Awal	323.831.718.088,05	291.635.286.428,55
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(323.831.718.088,05)	(291.631.786.428,55)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.3. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Balikpapan yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) merupakan ringkasan posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2020. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan akan diuraikan dalam penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

5.3.1. ASET	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp12.101.350.613.568,10	Rp11.649.591.539.644,30

Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2020 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Perbandingan Aset Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 55 Rincian Aset TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Aset Lancar	938.341.948.122,82	509.925.695.257,56	428.416.252.865,26
2.	Investasi Jangka Panjang	584.736.515.351,24	568.675.826.544,79	16.060.688.806,45
3.	Aset Tetap	10.313.106.847.790,60	10.296.946.525.667,20	16.160.322.123,41
4.	Aset Lainnya	265.165.302.303,40	274.043.492.174,79	(8.878.189.871,39)
	Jumlah	12.101.350.613.568,10	11.649.591.539.644,30	451.759.073.923,73

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Aset Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

5.3.1.1. ASET LANCAR	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp938.341.948.122,82	Rp509.925.695.257,56

Aset Lancar sebesar Rp938.341.948.122,82 merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Timurtara per 31 Desember 2020. Saldo kas di kas daerah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 57 Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Nama Rekening	No. Rekening	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Rekening Kas Umum Daerah Kota Balikpapan	0031300508	607.178.376.440,27	272.604.485.686,69	334.573.890.753,58
Jumlah			607.178.376.440,27	272.604.485.686,69	334.573.890.753,58

Dari saldo kas di kas daerah sebesar Rp607.178.376.440,27 per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan bahwa didalamnya terdapat uang jaminan pembongkaran reklame sebesar Rp1.949.765.417,65 yang telah disetor DPMPT selaku OPD yang mengelola dana tersebut. Uang jaminan tersebut diakui sebagai aset lain-lain Pemerintah Kota Balikpapan.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Penerimaan Rp32.832.816,00 Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp32.832.816,00 merupakan saldo kas di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan Tahun anggaran berakhir. Setelah melalui pemeriksaan kas kepada OPD per 31 Desember 2020 terdapat saldo kas yang belum disetorkan pada OPD Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup serta BPPDRD. Perbandingan Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	OPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
				5
1	2	3	4	5
1	Dinas Lingkungan Hidup	880.000,00	0,00	880.000,00
2	Dinas Perhubungan	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00
3	BPPDRD	26.697.816,00	0,00	26.697.816,00
Jumlah		32.832.816,00	0,00	32.832.816,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kas di Bendahara Penerimaan BPPDRD sebesar Rp26.697.816,00 terdiri dari :

- a. Kas di Rekening BRI sebesar Rp17.250.564,00
- b. Kas di Rekening Bank Mandiri sebesar Rp886.504,00
- c. Kas di Rekening Bank Kaltimtara (*Go-bills*) sebesar Rp8.560.748,00

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Pengeluaran Rp5.655.318.916,00 Rp0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp5.655.318.916,00 merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran OPD atas penerimaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) serta pajak yang belum disetorkan sampai dengan tahun anggaran berakhir. Sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran OPD bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 59 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	OPD	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PPKD	5.639.508.390,00	0,00	5.639.508.390,00
2.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	30,00	0,00	30,00
3.	Dinas Perdagangan	15.810.000,00	0,00	15.810.000,00
4.	Kecamatan Balikpapan Tengah	496,00	0,00	496,00
	Jumlah	5.655.318.916,00	0,00	5.655.318.916,00

Saldo kas di Dinas Perdagangan senilai Rp15.810.000,00 pada Dinas Perdagangan merupakan panjar TU atas perjalanan dinas yang terlambat disetorkan sampai tahun anggaran berakhir.

Saldo kas di PPKD senilai Rp5.639.508.390,00 merupakan sisa dari TU Dana Tak terduga yang diperuntukan untuk penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19. Dana yang dicairkan melalui mekanisme TU tersebut ditransfer dan dikelola Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Pada saat tahun anggaran 2020 berakhir ditemukan kondisi di lapangan bahwa Dinas Kesehatan masih melakukan kegiatan transaksi untuk penanggulangan Covid-19 seperti PCR/SWAB sehingga tidak memungkinkan untuk disetor per 31 Desember 2020.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.3.1.1.4. Kas di BLUD **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp52.059.825.643,74 **Rp42.998.060.309,42**

Kas di BLUD senilai Rp52.059.825.643,74 Merupakan Saldo Kas per 31 Desember 2020 yang terdapat pada delapan belas Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu. Saldo Kas di BLUD pada Tahun 2020 sebesar Rp52.059.825.643,74 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 60 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	RSKB Sayang Ibu	12.788.026.794,36	11.389.174.318,53	1.398.852.475,83
2	RSUD	34.033.266.798,61	27.732.682.024,21	6.300.584.774,40
3	Sepinggan	758.334.664,27	626.876.988,50	131.457.675,77
4	Klandasan Ilir	556.294.890,64	526.190.989,64	30.103.901,00
5	Prapatan	233.544.962,40	146.998.650,40	86.546.312,00
6	Mekar Sari	307.556.870,60	308.231.745,79	(674.875,19)
7	Baru Tengah	251.248.427,89	371.851.907,99	(120.603.480,10)
8	Karang Joang	330.576.552,52	486.550.366,50	(155.973.813,98)
9	Kariangau	87.189.529,42	90.203.235,42	(3.013.706,00)
10	Manggar Baru	448.187.121,00	489.937.495,14	(41.750.374,14)
11	Baru Ulu	279.053.865,59	134.788.481,09	144.265.384,50
12	Gunung Bahagia	408.767.429,07	353.073.803,07	55.693.626,00
13	UPT Labkesda	240.212.512,14	341.500.303,14	(101.287.791,00)
14	Batu Ampar	147.707.762,93	0,00	147.707.762,93
15	Manggar	122.943.259,37	0,00	122.943.259,37
16	Gunung Samarinda	57.927.431,02	0,00	57.927.431,02
17	Baru Ilir	219.058.877,17	0,00	219.058.877,17
18	Teritip	246.618.840,55	0,00	246.618.840,55



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
19	Damai	173.504.968,09	0.00	173.504.968,09
20	Karang Rejo	332.053.514,03	0.00	332.053.514,03
21	Muara Rapak	37.750.572,07	0.00	37.750.572,07
	Jumlah	52.059.825.643,74	42.998.060.309,42	7.862.177.018,78

Selain tabel perbandingan di atas, dapat dirincikan posisi keuangan BLUD per 31 Desember 2020 sesuai rekening bank dan tunai pada tabel berikut.

Tabel 61 Saldo Kas di BLUD Sesuai Rekening Bank dan Tunai per 31 Desember 2020

No	Unit Kerja	Bank	No. Rekening	Saldo Akhir	
				Bank (Rp)	Tunai (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Sakit Sayang Ibu	BNI	8989422088	4.706.784.902,00	1.490.000,00
		BTN	4501300006233	8.079.751.892,36	0,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Mandiri	1490011231125	695.220.485,51	21.995.557,40
		BRI	12101002212306	33.322.979.755,70	0,00
3.	Puskesmas Klandasan Ilir	BRI	12101003098307	554.172.890,64	2.122.000,00
4.	Puskesmas Baru Tengah	BRI	12101003099303	251.248.427,89	0,00
5.	Puskesmas Mekar Sari	Bank Kaltimara	31556104	667.870,60	1.015.000,00
		BRI	12101003095309	305.874.000,00	0,00
6.	Puskesmas Karang Joang	Bank Kaltimara	31556155	2.395.472,52	480.000,00
		BRI	12101003104302	327.701.080,00	0,00
7.	Puskesmas Sepinggan	Bank Kaltimara	1351500596	0,00	990.000,00
		BRI	12101003105308	757.344.664,27	0,00
8.	Puskesmas Kariangau	BRI	12101003102300	86.824.529,42	365.000,00
9.	Puskesmas Prapatan	BRI	12101003096305	233.544.962,40	0,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Unit Kerja	Bank	No. Rekening	Saldo Akhir	
				Bank (Rp)	Tunai (Rp)
10.	Puskesmas Manggar Baru	Bank Kaltimara	1211501029	0,00	1.940.000,00
		BRI	12101003122300	446.247.121,00	0,00
11.	Puskesmas Baru Ulu	BRI	12101003097301	278.868.865,59	185.000,00
12.	Puskesmas Gunung Bahagia	BRI	12101003110303	416.810.429,07	0,00
13.	UPT Labkesda	BRI	12101003111309	240.212.512,14	0,00
14.	Batu Ampar	BRI	012101003331307	147.707.762,93	0,00
15.	Manggar	BRI	211201000288306	122.943.259,34	0,00
16.	Gunung Samarinda	BRI	012101003324300	57.927.431,02	0,00
17.	Baru Ilir	BRI	012101003344300	219.058.877,17	0,00
18.	Teritip	BRI	012101003322308	246.604.050,55	0,00
19.	Damai	BRI	012101003323304	180.119.292,09	0,00
20.	Karang Rejo	BRI	012101003342308	328.266.549,03	89.730,00
21.	Muara Rapak	BRI	012101003347308	37.750.572,07	0,00
Sub Jumlah				52.047.027.655,31	30.672.287,40
Jumlah				52.077.699.942,71	

Saldo Bank dan Tunai pada BLUD berbeda dengan perhitungan Kas BLUD sebesar Rp17.874.298,97 karena perbedaan antara saldo kas di BLUD RSUD Damai Beriman dengan Saldo Rekening Koran sebesar Rp6.929.000,00 akibat kesalahan transfer yang tidak diakui sebagai pendapatan sehingga RSUD mengakuinya sebagai utang dan juga dari aktifitas transitoris pada Puskesmas Karang Rejo senilai Rp(3.697.235,00), Puskesmas Teritip senilai Rp(14.790,00), Puskesmas Manggar senilai Rp(0,03), Puskesmas Damai senilai Rp6.614.324,00 dan Puskesmas Gunung Bahagia senilai Rp8.043.000,00.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.3.1.1.5. Kas Lainnya **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp14.633.180.731,80 **Rp8.229.172.091,94**

Saldo Kas Lainnya merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di 17 (tujuh belas) Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp473.903.738,86, Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ada di 23 (dua puluh tiga) SMP dan 136 (seratus tiga puluh enam) SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.872.462.749,44 dan Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.776.565,00. Selain itu terdapat saldo kas di rekening Dinas Perdagangan pada Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp2.173.500,00 dimana kas tersebut tidak dapat ditelusuri asal maupun peruntukannya. Kemudian terdapat saldo kas dan bank pada rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berasal dari sumbangan masyarakat sebesar Rp12.700.000,00 dalam bentuk kas tunai dan Rp183.164.178,50 dalam bentuk saldo Bank. Saldo Kas Lainnya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 62 Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019

OPD	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	Bertambah/Berkurang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
Dinas Kesehatan Kota (JKN)	473.903.738,86	1.576.096.270,50	(1.102.192.531,64)
Dinas Pendidikan (BOS Pusat)	13.961.239.314,44	6.653.075.821,44	7.308.163.493,00
Dinas Perdagangan	2.173.500,00	0,00	2.173.500,00
PPKD (Gugus Tugas Covid-19)	195.864.178,50	0,00	195.864.178,50
Jumlah	14.633.180.731,80	8.229.172.091,94	6.404.008.639,86

Rincian lebih lanjut tentang Saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 3** (untuk perhitungan saldo kas BOS reguler) dan **Lampiran 4** (untuk perhitungan saldo kas JKN).

5.3.1.1.6. Piutang Pajak **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp311.744.962.775,56 **Rp279.111.307.455,16**

Piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp311.744.962.775,56 adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya tetapi belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 63 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pajak Hotel	11.009.257.883,41	0,00	11.009.257.883,41	4.070.309.117,00	(46.000.643,00)	15.033.566.357,41
2	Pajak Restoran	3.967.632.279,00	(725.636,00)	3.966.906.643,00	3.034.687.624,00	(415.154.075,00)	6.586.440.192,00
3	Pajak Hiburan	852.150.317,00	0,00	852.150.317,00	109.566.875,00	(108.773.701,00)	852.943.491,00
4	Pajak Reklame	4.916.109.417,75	(32.777.025,00)	4.883.332.392,75	393.290.270,00	(341.139.777,00)	4.935.482.885,75
5	Pajak Penerangan Jalan	155.991.389,00	0,00	155.991.389,00	174.388.254,00	0,00	330.379.643,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	420.852.000,00	0,00	420.852.000,00	66.554.150,00	0,00	487.406.150,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	396.907.222,00	(80.732.846,00)	316.174.376,00	74.201.559,00	(64.612.651,60)	325.763.283,40
8	Pajak Parkir	701.702.036,00	0,00	701.702.036,00	53.277.900,00	(3.129.000,00)	751.850.936,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	4.518.000,00	0,00	4.518.000,00	0,00	0,00	4.518.000,00
Jumlah		22.425.120.544,16	(114.235.507,00)	22.310.885.037,16	7.976.275.749,00	(978.809.847,60)	29.308.350.938,56
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2)	256.675.213.966,00	(345.564.669,00)	256.329.649.297,00	43.951.442.196,00	(17.855.452.601,00)	282.425.638.892,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.972.945,00	0,00	10.972.945,00	0,00	0,00	10.972.945,00
Total		279.111.307.455,16	(459.800.176,00)	278.651.507.279,16	51.927.717.945,00	(18.834.262.448,60)	311.744.962.775,56

Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat koreksi-koreksi pada beberapa akun piutang pajak yang dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- a. Koreksi pajak restoran sebesar Rp(725.636,00) terjadi karena pembatalan ketetapan atas NPWPD No.31869 tahun 2019.
- b. Koreksi pajak reklame sebesar Rp(32.777.025,00) terjadi karena koreksi lebih saji atas NPWPD No.32237 sebesar Rp625.000,00 dan NPWPD No.23100 sebesar Rp32.152.025,00.
- c. Koreksi pajak air bawah tanah sebesar Rp(80.732.846,00) terjadi karena pembetulan ketetapan pada NPWPD No.23158 sebesar Rp64.097.616,00 dan NPWPD No.21005 sebesar Rp16.635.230,00.
- d. Koreksi piutang PBB-P2 sebesar Rp(345.564.669,00) terjadi karena kurang saji atas pembetulan nilai ketetapan sebesar Rp24.310.006,00 dan pembetulan ketetapan senilai Rp369.874.675,00.
- e. Pada tahun 2020, dikeluarkan SK Pembatalan ketetapan atas 3.567 NOP yang tidak ditemukan keberadaannya. Atas 3.567 NOP tersebut, terdapat piutang yang masih disajikan di neraca tahun 2020 dengan total nilai sebesar Rp10.537.641.809,00. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat piutang pajak yang tidak diketahui keberadaannya dengan total nilai saji sebesar Rp11.089.585.889,00.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat terdapat peningkatan saldo yang cukup signifikan pada beberapa akun piutang pajak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Piutang pajak hotel Tahun 2020 senilai Rp15.033.566.357,41 meningkat 37% dari piutang tahun sebelumnya senilai Rp11.009.257.883,41 karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas piutang pajaknya dengan alasan menutupi biaya operasional akibat dampak dari pandemi covid-19 dan beberapa wajib pajak mengajukan permohonan keringanan pembayaran dengan cara angsuran.
- b. Piutang pajak restoran Tahun 2020 senilai Rp6.586.440.192,00 meningkat 66% dari piutang tahun sebelumnya senilai Rp3.967.632.279,00 karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas piutang pajaknya dengan alasan menutupi biaya operasional akibat dampak dari pandemi covid-19 dan beberapa wajib pajak mengajukan permohonan keringanan pembayaran dengan cara angsuran.
- c. Piutang pajak penerangan jalan Tahun 2020 senilai Rp330.379.643,00 meningkat 112% dari piutang tahun sebelumnya senilai Rp155.991.389,00 karena terdapat wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas piutang pajaknya dengan alasan masih dalam tahap proses administrasi pembayaran.

Daftar Mutasi Piutang Pajak berikut penjelasan koreksi saldo dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Penyisihan Pajak	Piutang	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp182.021.123.351,75)	(Rp161.319.556.619,60)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar (Rp182.021.123.351,75) merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang pajak dihitung



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kebun Sayur						
6	Pasar Penampungan 'A'	233.673.898,00	99.000,00	233.772.898,00	465.600.600,00	(357.076.030,00)	342.297.468,00
7	Pasar Pandansari	2.960.198.195,00	0,00	2.960.198.195,00	925.418.520,00	(709.147.306,00)	3.176.469.409,00
8	Pasar Kampung Baru Tengah dan Loak Besi	392.209.991,00	(286.560,00)	391.923.431,00	320.862.816,00	(238.340.836,00)	474.445.411,00
9	Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.216.678.877,16	(117.495.177,50)	1.099.183.699,66	1.198.187.383,00	(1.055.058.343,50)	1.242.312.739,16
10	Retribusi Kesehatan	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	0,00	(1.008.000,00)	0,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aset BPKD)	598.010.750,70	(24.000.000,00)	574.010.750,70	767.100.543,40	(754.660.988,83)	586.450.305,27
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	195.000.000,00	52.000.000,00	247.000.000,00	55.000.000,00	(58.200.000,00)	243.800.000,00
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Disporapar)	0,00	0,00	0,00	105.360.000,00	0,00	105.360.000,00
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	129.800.000,00	(105.800.000,00)	45.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rumah Produksi Tahu/Tempe)						
15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	112.843.750,00	0,00	112.843.750,00	2.192.881.780,00	(2.178.069.280,00)	127.656.250,00
16	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.970.298.200,00	0,00	1.970.298.200,00	6.009.560.000,00	(5.276.981.500,00)	2.702.876.700,00
17	Retribusi kebersihan PDAM	740.780.454,00	14.191.654,00	754.972.108,00	9.120.547.731,00	(9.098.990.339,00)	776.529.500,00
18	Retribusi Ijin Gangguan	348.610.500,00	0,00	348.610.500,00	0,00	0,00	348.610.500,00
19	Retribusi IMB	249.514.538,00	0,00	249.514.538,00	0,00	0,00	249.514.538,00
20	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	249.100.000,00	0,00	249.100.000,00	912.702.400,00	(890.781.600,00)	271.020.800,00
	Jumlah	16.853.425.793,86	(75.211.633,50)	16.778.214.160,36	25.286.215.620,90	(22.637.712.153,33)	19.426.717.627,93

Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
(Rp 15.094.009.689,84) (Rp10.851.580.685,25)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp15.094.009.689,84) merupakan taksiran nilai piutang retribusi yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang retribusi dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 66 Daftar penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penyisihan Piutang Retribusi	(15.094.009.689,84)	(10.851.580.685,25)	(4.242.429.004,59)
	Jumlah	(15.094.009.689,84)	(10.851.580.685,25)	(4.240.241.504,59)

Daftar Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.8. Piutang Jasa Layanan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
(BLUD) Rp6.822.831.813,16 Rp24.780.076.204,00

Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.822.831.813,16 merupakan nilai tagihan terhadap Pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSKB Sayang Ibu Balikpapan, 16 (enam belas) BLUD Puskesmas dan UPT Labkesda di Dinas Kesehatan Kota serta Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Mutasi Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 67 Rincian Piutang BLUD (Jasa Layanan) per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	OPD	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (+) (Rp)	Mutasi Kurang (-) (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RSKB SAYANG IBU	1.807.106.900,00	0,00	1.807.106.900,00	597.143.600,00	(1.709.555.600,00)	694.694.900,00
2	RSUD	22.938.053.804,00	0,00	22.938.053.804,00	6.079.715.913,16	(22.938.053.804,00)	6.079.715.913,16
3	DINAS KESEHATAN	34.915.500,00	0,00	34.915.500,00	48.421.000,00	(34.915.500,00)	48.421.000,00
	Jumlah	24.780.076.204,00	0,00	24.780.076.204,00	6.725.280.513,16	(24.682.524.904,00)	6.822.831.813,16

Daftar rincian mutasi Piutang Jasa Layanan Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 70 Daftar Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Pihak III	Tahun 2020	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	BOT - Pasar Muara Rapak	PT Hasta Kreasi Utama	12.500.004,00	4,00
2	BOT - Pasar Baru Square	PT Hasta Kreasi Utama	600.000.000,00	500.000.000,00
3	BOT - Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur (Plaza Bunsay)	PT Gusher Mitra Sejahtera	875.289.010,00	675.722.525,00
4	Sisa Abonemen BPPDRD	BRI	1.713.092,00	0,00
5	Gaji Pegawai / Taspen	Pegawai Pensiunan	106.475.300,00	161.964.900,00
6	Piutang Kerjasama Sewa / RSUD	Kantin RSUD dan sewa ruangan	7.000.000,00	6.750.000,00
7	Piutang Studi Banding & Uji Validasi Data (RSUD)		1.200.000,00	1.320.000,00
JUMLAH			1.604.177.406,00	1.345.757.429,00
JUMLAH PENYISIHAN			(641.308.890,50)	(706.886.703,50)
JUMLAH SETELAH PENYISIHAN			962.868.515,50	638.870.725,50

Daftar rincian Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp31.723.027.000,00	Rp17.371.977.000,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp31.723.027.000,00 merupakan piutang atas kurang bayar Dana Bagi Hasil Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 045/K.79/2021, Tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2020. Daftar rincian dan penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 71 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dana Bagi Hasil Provinsi - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.237.979.000,00	0,00	8.237.979.000,00	21.418.023.000,00	8.237.979.000,00	21.418.023.000,00
2	Dana Bagi Hasil Provinsi - Air Permukaan	65.542.000,00	0,00	65.542.000,00	47.634.000,00	65.542.000,00	47.634.000,00
3	Dana Bagi Hasil Provinsi - Pajak Kendaraan Bermotor	5.614.721.000,00	0,00	5.614.721.000,00	5.369.447.000,00	5.614.721.000,00	5.369.447.000,00
4	Dana Bagi Hasil Provinsi - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.453.735.000,00	0,00	3.453.735.000,00	4.887.923.000,00	3.453.735.000,00	4.887.923.000,00
JUMLAH		17.371.977.000,00	0,00	17.371.977.000,00	31.723.027.000,00	17.371.977.000,00	31.723.027.000,00
PENYISIHAN (0,5%)		(86.859.885,00)	0,00	(86.859.885,00)	(158.615.135,00)	(86.859.885,00)	(158.615.135,00)
JUMLAH SETELAH PENYISIHAN		17.285.117.115,00	0,00	17.285.117.115,00	31.564.411.865,00	17.285.117.115,00	31.564.411.865,00

5.3.1.1.12. Uang Muka Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Pengadaan Muka Rp0,00 Rp336.038.363,06
Barang/Jasa

Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang pembayarannya melebihi prestasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2019 sebesar Rp336.038.363,06 yang terdiri terdiri dari: Pekerjaan Jalan Menuju Kampus ITK sebesar Rp70.537.671,82, Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu II sebesar Rp72.366.507,36, dan Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu sebesar Rp193.134.183,88 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan telah diselesaikan pekerjaannya di tahun 2020.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 72 Daftar Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	336.038.363,06	(336.038.363,06)
Jumlah		0,00	336.038.363,06	(336.038.363,06)

5.3.1.1.13. Belanja Dibayar Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Dimuka Rp1.710.200.253,23 Rp1.066.063.135,52

Saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp1.710.200.253,23 merupakan pembayaran beberapa OPD atas sewa gedung, pemeliharaan peralatan kantor dan jasa internet yang perikatan dengan pihak ketiga melewati Tahun 2020. Daftar Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 73 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Sewa Gedung/Rumah	30.931.506,86	21.533.060,11	9.398.446,75
2.	Pemeliharaan dibayar Dimuka	8.863.890,41	1.494.819,67	7.369.070,74
3.	Jasa internet	1.662.939.282,19	1.043.035.255,74	619.904.026,45
4.	Jasa Tenaga Ahli	7.465.573,77	0,00	7.465.573,77
Jumlah		1.710.200.253,23	1.066.063.135,52	644.137.117,71

Daftar Rincian Belanja Dibayar Dimuka per OPD dapat dilihat di **Lampiran 11**.

5.3.1.1.14. Persediaan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp83.245.738.228,80 Rp23.673.183.332,62

Persediaan sebesar Rp83.245.738.228,80 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada OPD yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepada



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

masyarakat. Persediaan tersebut berupa alat tulis kantor, blanko/cetakan, benda berharga, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, alat kebersihan dan alat listrik, bahan makanan serta perlengkapan lapangan dan kesehatan yang belum digunakan per 31 Desember 2020 dan juga barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Rincian persediaan per jenis barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sedangkan rincian per jenis barang per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Tabel 74 Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Alat Tulis Kantor	3.606.346.523,69	2.183.839.102,21	1.422.507.421,48
2	Blanko/Cetakan	3.565.921.429,50	2.874.904.171,93	691.017.257,57
3	Benda Berharga	46.590.100,00	20.633.700,00	25.956.400,00
4	Obat-obatan	9.680.798.776,65	7.993.207.769,81	1.687.591.006,84
5	Bahan Kimia	3.362.972.192,16	1.190.823.525,48	2.172.148.666,68
6	Bahan Bangunan	533.319.650,50	535.714.637,28	(2.394.986,78)
7	Cadangan Energi	12.233.993,13	201.332.846,88	(189.098.853,75)
8	Alat Kebersihan	671.114.226,54	345.118.307,13	325.995.919,41
9	Alat Kesehatan	7.063.717.737,72	3.100.611.562,55	3.963.106.175,17
10	Alat Listrik	302.527.911,40	192.521.630,00	110.006.281,40
11	Perlengkapan Lapangan	1.145.856.235,00	629.478.394,00	516.377.841,00
12	Bahan Makanan dan Minuman	655.562.142,94	954.390.145,35	(298.828.002,41)
13	Bibit Tanaman & Ternak	4.005.981.325,00	3.450.607.540,00	555.373.785,00
14	Barang diserahkan ke Pihak Ketiga	48.592.795.984,57	0,00	48.592.795.984,57
Jumlah		83.245.738.228,80	23.673.183.332,62	59.572.554.896,18

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik kecuali untuk persediaan obat-obatan dengan menggunakan metode perpetual. Adapun metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode *First In First Out (FIFO)*.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat persediaan barang diserahkan kepada pihak senilai Rp48.239.115.730,57 yang merupakan pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Teritip.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Sisa persediaan diperoleh melalui berbagai sumber yaitu program kegiatan OPD, Dana Tak Terduga Penanggulangan Covid-19, BLUD dan BOS Reguler (Non APBD) serta hibah barang dari pihak lain (BUMD, Perusahaan dan Masyarakat) yang diberikan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19. pada OPD Dinas Pendidikan yang didapat dari belanja yang bersumber dari BOS Reguler (Non APBD) seperti pada tabel berikut.

**Tabel 75 Rincian Persediaan yang Bersumber Dari BOS Reguler
per 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	BOS Reguler 2020 (Rp)	BOS Reguler 2019 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Alat tulis kantor	695.010.121,00	251.646.897,00	443.363.224,00
2.	Blanko/Cetakan	5.094.200,00	6.114.550,00	(1.020.350,00)
3.	Benda Berharga	4.782.000,00	6.158.000,00	(1.376.000,00)
4.	Obat-obatan	103.823.250,00	22.562.233,00	81.261.017,00
5.	Bahan Kimia	8.343.950,00	190.000,00	8.153.950,00
6.	Bahan Bangunan	18.140.400,00	1.164.500,00	16.975.900,00
7.	Cadangan Energi	3.310.755,00	2.040.900,00	1.269.855,00
8.	Alat Kebersihan	246.391.824,00	68.309.056,00	178.082.768,00
9.	Alat Kesehatan	148.315.050,00	25.000,00	148.290.050,00
10.	Alat listrik	89.442.100,00	18.110.190,00	71.331.910,00
11.	Perlengkapan lapangan	54.895.125,00	8.690.000,00	46.205.125,00
12.	Bahan Makanan dan Minuman	3.895.000,00	40.000,00	3.855.000,00
13.	Bibit Tanaman Dan Ternak	10.057.750,00	375.000,00	9.682.750,00
	Jumlah	1.391.501.525,00	385.426.326,00	1.006.075.199,00

Untuk persediaan yang diperoleh melalui Belanja Tak Terduga dan dari Hibah Pihak Ketiga baik melalui masyarakat maupun pemerintah/instansi vertikal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 disajikan pada **Lampiran 12.1**



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp584.736.515.351,24 Rp568.675.826.544,79

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp579.347.666.187,83 merupakan Investasi Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari Investasi Non permanen dan Investasi Permanen dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 76 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4
Investasi Non Permanen	6.911.687.347,22	6.914.567.347,22	(2.880.000,00)
Penyisihan	(3.855.178.090,66)	(3.870.981.265,08)	(15.803.174,42)
Investasi Permanen	581.680.006.094,68	565.632.240.462,65	16.047.765.632,03
Jumlah	584.736.515.351,24	568.675.826.544,79	16.060.688.806,45

Jumlah Investasi Nonpermanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.911.687.347,22 setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp(3.855.178.090,66) menjadi Rp3.056.509.256,56 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan penjelasan pada tabel berikut.

Tabel 77 Rincian Investasi Non permanen per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Nama	Nomor Rekening (Rp)	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2019
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perikanan	6.010.015.991	443.822.167,12	444.062.167,12
2.	Tanaman Pangan	6.010.005.415	152.658.991,73	152.898.991,73
3.	Saprodi Pertanian	6.010.016.052	257.620.389,89	257.860.389,89
4.	Penangkaran Benih	6.010.016.056	347.065.331,48	347.305.331,48
5.	Perkebunan Kenaf	6.010.015.995	208.959.999,12	209.199.999,12
6.	P2UPRA	6.010.016.051	174.661.908,55	174.901.908,55
7.	Tanaman Hias P2PT	6.010.015.994	12.273.805,79	12.513.805,79
8.	Peternakan	6.010.015.212	140.572.630,64	140.812.630,64
9.	Saprodi Total	6.010.016.054	93.550.000,00	93.790.000,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Nomor Rekening (Rp)	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2019
			(Rp)	(Rp)
10.	Saprodi Unocal	6.010.013.415	76.075.480,42	76.315.480,42
11.	Kredit Mikro Pemerintah Kota	6.010.011.915	113.015.027,99	113.255.027,99
12.	IK-IRT Dana Gakin	6.010.015.993	1.001.413.493,32	1.001.413.493,32
13.	IK-IRT	6.010.016.057	3.889.998.121,17	3.890.238.121,17
	Jumlah Dana Bergulir Bruto		6.911.687.347,22	6.914.567.347,22
	Jumlah Penyisihan		(3.855.178.090,66)	(3.870.981.265,08)
	Jumlah Bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value)		3.056.509.256,56	3.043.586.082,14

Daftar Investasi Nonpermanen (Dana Bergulir) berdasarkan Umur dapat dilihat dalam **Lampiran 13**.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan dana pinjaman yang dikelola oleh instansi teknis/OPD, yaitu Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian pada Bank Muamalat Cabang Balikpapan. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada petani, peternak, nelayan dan pengusaha kecil. Sampai dengan 31 Desember 2020 total dana yang dikelola untuk program tersebut sebesar Rp6.911.687.347,22. Namun dari dana yang disalurkan tersebut dana yang diragukan/tidak dapat ditagih adalah sebesar (Rp3.855.178.090,66) sehingga jumlah bersih dana bergulir (*net realizable value*) adalah sebesar Rp3.056.509.256,56
- b. Penyediaan Fasilitas Kredit UMKMK sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan penjaminan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Penempatan awal penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 dan ditempatkan dalam bentuk rekening giro pada Bankaltimta. Penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut tidak memenuhi definisi operasional sebagai Investasi Nonpermanen Dana Bergulir sesuai Buletin Teknis Nomor 7 tentang Dana Bergulir sehingga akun tersebut dikelompokkan pada kas yang dibatasi penggunaannya atau dikelompokkan pada Aset lain-lain.
- c. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan antara lain oleh:
 - 1) nasabah telah meninggal dunia;
 - 2) nasabah telah pindah alamat dan tidak diketahui alamat yang baru; dan
 - 3) nasabah sudah tua renta, tidak sanggup mengangsur dan termasuk keluarga miskin.
- d. Besar suku bunga dana bergulir yang dikenakan terhadap peminjam (nasabah) adalah sebesar 10% untuk dana bergulir jenis Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IK-IRT), sedangkan dana bergulir lainnya sebesar 0%.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- e. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui pengembalian dana bergulir oleh nasabah tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan, sebagian besar nasabah tidak bisa menepati janji pelunasan seperti yang dituangkan dalam akad perjanjian. Diketahui sebagian besar nasabah menunggak lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun yang lalu Pemerintah Kota Balikpapan mengambil kebijakan tidak menggulirkan lagi dana bergulir, namun berfokus pada upaya-upaya pengamanan/pengembalian terhadap dana bergulir yang telah disalurkan. Disamping itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyerahkan beberapa penagihan piutang dana bergulir tersebut kepada KPKNL. Dengan kebijakan tersebut jumlah dana bergulir yang tidak disalurkan kembali ke nasabah mencapai saldo sebesar Rp Rp3.071.868.599,56 per 31 Desember 2020. Daftar Dana Bergulir yang tidak disalurkan (Saldo di Bank dan yang ditarik KPKNL) dan yang disalurkan ke nasabah Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp576.291.156.931,27 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada BUMD yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 78 Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penyertaan Modal pada Bank Kaltimara	132.010.000.000,00	127.350.000.000,00	4.660.000.000,00
2.	Penyertaan pada PDAM Kota Balikpapan	403.655.762.254,68	391.898.692.407,65	11.757.069.847
3.	Penyertaan pada Perusda Manuntung Sukses Kota Balikpapan	46.014.243.840,00	46.383.548.055,00	(369.304.215)
	Jumlah	581.680.006.094,68	565.632.240.462,65	16.047.765.632

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Balikpapan menyertakan modal kepada PDAM sebesar Rp10.000.000.000,00 dan kepada Bank Kaltimara sebesar Rp4.660.000.000. Selain itu, dapat diinformasikan bahwa Penilaian Investasi Permanen pada Bankaltimara menggunakan metode biaya (*cost method*). Sedangkan penilaian investasi permanen pada PDAM Kota Balikpapan dan Perusda Manuntung Sukses Kota Balikpapan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*). Metode penilaian ini dimuat dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Sampai dengan Tahun 2020, masih terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp49.791.743.334,00. Hal tersebut terjadi karena belum ada Naskah Hibah atas penyerahan barang tersebut. Adapun rincian barang, asal dan nilai atas penyertaan modal dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 79 Rincian Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya

No	Uraian	Asal Instansi	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	4.348.478.000,00
2	Pembangunan IPA Kp Baru Kap. 50 LPS (Paket 2) (APBD I)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	7.560.240.000,00
3	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dari Dinas PU Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	13.164.279.000,00
Subtotal Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi			25.072.997.000,00
4	Pengadaan Pipa Distribusi HDPE 150 mm P=4,114 m dan ass. Di lokasi Kel. Damai, Kel. Marga Sari, Kel. Batu Ampar Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	3.350.114.000,00
5	Pipa Steel 600 mm P=1,300 m di lokasi Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	3.554.684.000,00
6	Pipa Air Baku 700 mm P=2,700 m di lokasi Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	11.997.337.000,00
7	Pipa Distribusi Induk HDPE 200 mm P=2,500 m di lokasi Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	1.149.821.000,00
8	Supervisi Konstruksi Bantuan Program Penyehatan PDAM di lokasi Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	69.593.334,00
9	Jaringan Pipa Distribusi HDPE 150-75 mm P=2.800 m di lokasi Kel. Batu Ampar Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	687.157.000,00
10	Review Desain Supervisi mendukung Kawasan MBR di lokasi Kel. Batu Ampar Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	131.300.000,00
11	Supervisi Wilayah I lokasi di Kota Balikpapan	Pemerintah Pusat	78.740.000,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Asal Instansi	Nilai (Rp)
1	2	3	4
	(APBN)		
12	Penerimaan Hibah P/P Pipa HDPE dia 200-100 mm lokasi Kel. Karang Joang Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	3.700.000.000,00
Subtotal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat			24.718.746.334,00
Total Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya			49.791.743.334,00

Selain itu, Terdapat penyertaan modal dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa pembangunan sarana dan prasarana perpipaan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan direalisasikan sebesar Rp28.789.670.183,91 serta belum tercatat, baik di Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan maupun Laporan Keuangan PDAM Kota Balikpapan. Rincian sarana dan prasarana perpipaan yang diserahkan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 80 Rincian Sarana dan Prasarana Perpipaan

No	Uraian	Instansi	Nilai (Rp)	BAST	Penerima BAST
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Balikpapan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2.098.325.000,00	605/1379/XI/2015 tanggal 23 November 2015	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
2	Pembangunan IPLT Balikpapan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	5.282.975.000,00	640/1768/CK.DPU/2016 tanggal 28 November 2016	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
3	Pembangunan Jaringan Perpipaan Institut Teknologi Kalimantan dan Jaringan Distribusi Pipa Manggar Balikpapan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	13.164.279.000,00	602/05/ST-P/XI/2016 tanggal 7 November 2016	PDAM Kota Balikpapan
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa	Pemerintah Provinsi	8.244.091.183,91	694.2/2611/CK-KASLPLP tanggal 21	PDAM Kota



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Instansi	Nilai (Rp)	BAST	Penerima BAST
1	2	3	4	5	6
	Distribusi Teritip Balikpapan	Kalimantan Timur		Desember 2020	Balikpapan
		Jumlah	28.789.670.183,91		

Sarana dan prasarana pada tabel di atas tidak hanya diserahkan kepada PDAM namun juga kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakanan. Hal tersebut terjadi karena pada saat pencatatan Investasi Permanen pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan ataupun pengakuan modal pada Laporan Keuangan PDAM, dokumen yang diperlukan berupa naskah perjanjian hibah belum diperoleh. Rincian Investasi Jangka Panjang selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.3. Aset Tetap Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp13.549.911.206.018,40 Rp13.171.855.096.072,40

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp13.549.911.206.018,40 dan Rp13.171.855.096.072,40 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian aset tetap Tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 81 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Nilai Tahun 2020 (Rp)	Nilai Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah	5.368.852.714.404,30	5.368.469.568.154,30	383.146.250,00	0,01
2.	Peralatan dan Mesin	909.928.319.765,36	831.332.096.723,39	78.596.223.041,97	9,45
3.	Gedung dan Bangunan	3.880.708.672.740,14	3.831.427.649.556,19	49.281.023.183,95	1,29
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.186.760.130.538,47	2.911.177.693.181,36	275.582.437.357,11	9,47
5.	Aset Tetap Lainnya	70.399.499.845,85	62.747.452.185,24	7.652.047.660,61	12,19
6.	Konstruksi Dalam	133.261.868.724,28	166.700.636.271,94	(33.438.767.547,66)	(20,06)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Nilai Tahun 2020 (Rp)	Nilai Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pengerjaan				
	Jumlah	13.549.911.206.018,40	13.171.855.096.072,40	378.056.109.945,99	2,87

Rincian nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2020 setelah di kurangi dengan nilai penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 82 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tanah	5.368.852.714.404,30	0,00	5.368.852.714.404,30
2.	Peralatan dan Mesin	909.928.319.765,36	(716.658.516.024,00)	193.269.803.741,36
3.	Gedung dan Bangunan	3.880.708.672.740,14	(664.008.024.340,34)	3.216.700.648.399,80
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.186.760.130.538,47	(1.852.784.340.879,46)	1.333.975.789.658,99
5.	Aset Tetap Lainnya	70.399.499.845,85	(3.353.476.986,00)	67.046.022.859,85
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.261.868.724,28	0,00	133.261.868.724,28
	Jumlah	13.549.911.206.018,40	(3.236.804.358.229,80)	10.313.106.847.788,60

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp10.313.106.847.788,60 merupakan nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 83 Rincian Mutasi/Koreksi Aset Tetap per 31 Desember 2020

Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1			2
Saldo Aset Tetap TA 2019 (Audited)			13.171.855.096.072,40
Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2020			568.300.304.339,72
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2020	428.218.585.694,51	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	58.015.131.137,96	
c.	Terima Hibah	7.007.237.010,69	
d.	Terima Mutasi dari SKPD lain	827.242.058,00	
e.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	614.146.250,00	
f.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	73.280.548.825,50	
g.	Koreksi	336.038.363,06	
h.	Penilaian/Utang	1.375.000,00	
Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2020			190.244.194.393,75
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	37.518.728.315,10	
b.	Penghapusan Aset Tetap	248.172.600,00	
c.	Mutasi ke SKPD lain	827.242.058,00	
d.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4.733.143.992,14	
e.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	73.280.548.825,50	
f.	Reklasifikasi ke Persediaan (biaya)	48.250.086.030,57	
g.	Barang di bawah kapitalisasi	24.550.690.572,44	
h.	Penilaian/Utang	835.582.000,00	
Jumlah Saldo per 31 Desember 2020			13.549.911.206.018,40
Akumulasi Penyusutan			(3.236.804.358.229,80)
Nilai Buku per 31 Desember 2020			10.313.106.847.788,60

- a. Saldo Aset Tetap TA 2019 (*Audited*) sebesar Rp3.171.855.096.072,40.
b. Mutasi tambah Aset Tetap TA 2020 sebesar Rp568.300.304.339,72 dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1) Realisasi Belanja Modal 2020 sebesar Rp428.218.585.694,51 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp48.900.000,00 (0,01%), Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.713.984.207,21 (15,35%), Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp75.077.627.280,00 (17,53%), Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp260.738.034.953,11 (60,89%) dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp26.640.039.254,19 (6,22%). Rincian Realisasi Belanja Modal 2020 per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp58.015.131.137,96. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih. Selain itu, dari nilai Rp58.015.131.137,96. didalamnya terdapat perolehan aset tetap yang bersumber dari realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Pandemi Covid-19 yang di keluarkan oleh PPKD dan dikelola oleh Perangkat Daerah dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp3.531.816.581,73, Satpol PP sebesar Rp91.200.000,00, dan RSUD Beriman sebesar Rp2.659.847.031,00.
Rincian Belanja Belanja Jasa/Pemeliharaan yang menambah AT (kapitalisasi) per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**
Sedangkan rincian aset tetap yang diperoleh dari realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Pandemi Covid-19 yang termasuk disajikan dalam penjelasan Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) dilihat pada **Lampiran 17.1**
- 3) Terima Hibah sebesar Rp7.007.237.010,69 yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.397.182.531,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp210.000.000,00, RSKB Sayang Ibu sebesar Rp18.047.700,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.011.233.781,69, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp166.772.998,00, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah sebesar Rp204.000.000,00. Rincian Terima Hibah per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 84 Rincian Penerimaan Hibah Aset Per 31 Desember 2020

No	Nama OPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	BPBD	5.143.955.154,00	253.227.377,00	5.397.182.531,00
2	Dinas Kesehatan	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
3	RSKB Sayang Ibu	18.047.700,00	0,00	18.047.700,00
4	Dinas Pendidikan	981.623.000,00	29.610.781,69	1.011.233.781,69



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama OPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	dan Kebudayaan			
5	Disdukcapil	166.772.998,00	0,00	166.772.998,00
6	BPPDRD	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
	Jumlah	6.724.398.852,00	282.838.158,69	7.007.237.010,69

- 4) Terima mutasi dari OPD lain sebesar Rp827.242.058,00. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar OPD.
- 5) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp614.146.250,00 merupakan aset tetap dengan kondisi baik dan masih dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok perangkat daerah namun belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Setelah dilakukan proses inventarisasi, aset tersebut dicatat pada daftar inventaris barang milik daerah menyesuaikan dengan klasifikasi aset tetapnya berdasarkan Berita Acara Barang Milik Ditemukan Yang Belum Tercatat Kartu Inventaris Barang (KIB) yang di tandatangani oleh Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengelola Barang yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.960.000,00, Dinas Pangan Pertanian Perikanan sebesar Rp500.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp575.310.000,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp31.376.250,00. Rincian aset yang ditemukan/hasil inventarisasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 85 Rincian Aset yang Ditemukan per 31 Desember 2020

No	Nama OPD	Tanah (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	BPBD	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00
2	Dinas Pangan Pertanian Perikanan	500.000,00	0,00	500.000,00
3	BPKD	344.310.000,00	231.000.000,00	575.310.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	31.376.250,00	0,00	31.376.250,00
	Jumlah	383.146.250,00	231.000.000,00	614.146.250,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 6) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp72.839.574.370,92.
- 7) Koreksi sebesar Rp336.038.363,06 merupakan kapitalisasi aset tetap Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu sebesar Rp193.134.183,88, Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu II sebesar Rp72.366.507,36 dan Pekerjaan Jalan Menuju Kampus ITK Balikpapan sebesar Rp70.537.671,82 yang pada tahun 2019 nilai aset tetap tersebut dikoreksi menjadi uang muka belanja akibat koreksi lebih catat aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan di KIB F yang nilai pembayaran pekerjaan lebih besar daripada prestasi fisik per 31 Des 2019.
- 8) Penilaian/Utang sebesar Rp1.375.000,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan pengadaan 1 unit thermogun (alat pengukur suhu) pada Puskesmas Kariangau yang aset tetapnya telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB B) Peralatan dan Mesin, namun belum dibayarkan pada tahun anggaran 2020.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap TA 2020 sebesar Rp190.244.194.393,75 dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap sebesar Rp37.518.728.315,10.
 - 2) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp248.172.600,00 pada Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan proses penghapusan barang dengan kondisi baik dari daftar inventaris barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-213 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Balikpapan Utara Dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Balikpapan akibat dampak musibah kebakaran yang terjadi di Kantor kelurahan Graha Indah.
 - 3) Mutasi ke OPD lain sebesar Rp827.242.058,00. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar OPD.
 - 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp4.733.143.992,14 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.195.025.212,00. dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.538.118.780,14. Rincian Reklasifikasi dari AT ke AL per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**
 - 5) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp73.280.548.825,50.
 - 6) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) sebesar Rp48.250.086.030,57 pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari :
 - a) Sebesar Rp10.970.300,00, merupakan pembelian alat tulis kantor yang telah direalisasikan dari rekening belanja modal, namun fisik pekerjaannya tidak dapat dilanjutkan karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Pemerintah Kota merefocusing kembali APBD.
 - b) Sebesar Rp48.239.115.730,57 merupakan koreksi Pemeriksaan BPK atas penganggaran dan pencatatan realisasi belanja modal jalan irigasi jaringan pada aset Jaringan Distribusi SPAM Teritip yang tercatat pada KIB D (Jalan Irigasi Jaringan) Dinas Pekerjaan Umum yang tidak sesuai dengan definisi dari pelaksanaan belanja modal karena lebih tepat masuk dalam kelompok belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sehingga



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

dilakukan reklasifikasi ke barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 86 Rincian Aset Tetap yang di Reklasifikasi ke Barang Persediaan untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2020

No	Nama Barang	Kode Barang	Register	Tahun	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1.3.4.04.001.002.003	00002	2020	13.852.284.552,56	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Teritip
2	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1.3.4.04.001.002.002	00002	2019	24.954.944.678,01	Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Teritip
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1.3.4.04.001.002.002	00001	2018	9.431.886.500,00	Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Teritip
Jumlah					48.239.115.730,57	

- 7) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp24.550.690.572,44 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.977.020.342,20, Gedung dan Bangunan sebesar Rp775.279.893,68, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.520.960.386,56 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp81.132.900,00 dan Kontruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp196.297.050,00. Rincian Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**
- 8) Penilaian/Utang sebesar Rp835.582.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pembayaran atas pengadaan dan pencatatan aset tetap yang telah dilakukan tahun anggaran 2019 namun pembayarannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.
- d. Penjelasan selisih tambah kurang antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dapat dijelaskan bahwa nilai aset tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing masing sebesar Rp13.549.911.206.018,40 dan Rp13.171.855.096.072,40, sementara realisasi belanja modal sebesar Rp428.218.585.694,51.

Selain itu, terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp50.162.475.748,54 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 87 Rincian Selisih Antara Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Aset Tetap

Uraian		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)
1		2	3
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap(kapitalisasi)	58.015.131.137,96	(37.518.728.315,10)
b.	Terima Hibah	7.007.237.010,69	0,00
c.	Terima Mutasi dari SKPD lain	827.242.058,00	0,00
d.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	614.146.250,00	0,00
e.	Diserahkan/Dihibahkan	0,00	0,00
f.	Penghapusan Aset Tetap	0,00	(248.172.600,00)
g.	Mutasi ke SKPD lain	0,00	(827.242.058,00)
h.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00	(4.733.143.992,14)
i.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00	0,00
j.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	73.280.548.825,50	(73.280.548.825,50)
k.	Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya	0,00	(48.250.086.030,57)
l.	Koreksi	336.038.363,06	0,00
m.	Barang Rusak Berat	0,00	0,00
n.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut	0,00	0,00
o.	Barang di bawah kapitalisasi	0,00	(24.550.690.572,44)
p.	Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA	0,00	0,00
q.	Penilaian/Utang (Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	1.375.000,00	(835.582.000,00)
Jumlah		140.081.718.645,21	(190.244.194.393,75)
Selisih Tambah / (Kurang)			(50.162.475.748,54)
Belanja Modal Aset Lainnya			474.100.000,00
Total Selisih Tambah Kurang			(49.688.375.748,54)

5.3.1.3.1. Tanah

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

Rp5.368.852.714.404,30

Rp5.368.469.568.154,30

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.368.852.714.404,30 dan Rp5.368.469.568.154,30 yang merupakan aset berwujud



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Tanah pada TA 2020 sebesar Rp383.146.250,00 atau sebesar 0,01%. Nilai tercatat (*carrying amount*) Aset Tetap Tanah disajikan berdasarkan biaya perolehan dan Aset Tetap Tanah tidak disusutkan. Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2020 sebesar Rp5.368.852.714.404,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 88 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4
I.	Saldo Aset Tanah TA 2019 (<i>Audited</i>)		5.368.469.568.154,30
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2020		
a.	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020	48.900.000,00	
b.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	383.146.250,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		432.046.250,00
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2020		
a.	Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap	48.900.000,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		48.900.000,00
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 20120		5.368.852.714.404,30

- a. Saldo Aset Tetap Tanah TA 2019 (*Audited*) sebesar Rp5.368.469.568.154,30.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Tanah TA 2020 sebesar Rp432.046.250,00 dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2020 sebesar Rp48.900.000,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.600.000,00 dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp39.300.000,00.
 - 2) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp383.146.250,00 yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.960.000,00 Dinas Pangan Pertanian Perikanan sebesar Rp500.000,00 Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp344.310.000,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp31.376.250,00.
 - 3) Mutasi kurang Aset Tetap Tanah TA 2020 sebesar Rp48.900.000,00 disebabkan Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp48.900.000,00.

Kondisi lain tentang Aset Tetap Tanah Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset Tetap Tanah belum memiliki sertifikat.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Terdapat Aset Tetap Tanah yang belum memiliki sertifikat disajikan pada **Lampiran 19.1**

- b. Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk pinjam pakai, sewa, dan BOT:
- 1) Pinjam pakai tanah dilakukan sesama instansi pemerintah sebanyak 14 (empat belas) bidang tanah yang disajikan pada **Lampiran 19.2**
 - 2) Sewa tanah oleh pihak lain sebanyak 90 (sembilan puluh) bidang tanah yang disajikan pada **Lampiran 19.3**
 - 3) Aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk *Build Of Transfer* (BOT) sebanyak 4 (empat) bidang tanah disajikan pada **Lampiran 19.4**
- c. Aset Tetap Tanah Untuk Jalan Tol Sebesar Rp48.956.140.919,00 belum Jelas Status Penggunaannya.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp909.928.319.765,36 Rp831.332.096.723,39

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp909.928.319.765,36 dan Rp831.332.096.723,39 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada TA 2020 sebesar Rp78.596.223.041,97 atau sebesar 9,45%.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2020 sebesar Rp909.928.319.765,36 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 89 Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4
I.	Saldo Aset Peralatan Mesin TA 2019 (Audited)		831.332.096.723,39
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2020		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2020	65.713.984.207,21	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	5.481.246.554,73	
c.	Terima Hibah	6.724.398.852,00	
d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	25.379.993.978,23	
e.	Penilaian/Utang	1.375.000,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		103.300.998.592,17



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2020		
	a.	Penghapusan Aset Tetap	248.172.600,00
	b.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.195.025.212,00
	c.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	448.975.396,00
	d.	Barang di bawah kapitalisasi	21.977.020.342,20
	e.	Penilaian/Utang	835.582.000,00
		Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi	24.704.775.550,20
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2020		909.928.319.765,36
V.	Akumulasi Penyusutan		(716.658.516.024,00)
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2020		193.269.803.741,36

- a. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2019 (*Audited*) sebesar Rp831.332.096.723,39
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp103.300.998.592,17 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2020 sebesar Rp65.713.984.207,21 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 90 Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2020

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2020 (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat DPRD	1.122.347.050,00
2	Sekretariat Daerah	1.832.339.610,00
3	Kecamatan Balikpapan Timur	180.251.500,00
4	Kecamatan Balikpapan Barat	134.230.000,00
5	Kecamatan Balikpapan Utara	439.525.000,00
6	Kecamatan Balikpapan Tengah	167.280.000,00
7	Kecamatan Balikpapan Kota	153.008.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum	4.839.940.898,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	584.595.000,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2020 (Rp)
1	2	3
10	Dinas Perumahan dan Pemukiman	346.696.400,00
11	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	211.298.500,00
12	Dinas Perhubungan	1.767.095.310,00
13	Dinas Kesehatan Kota	6.479.003.112,80
14	Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu	1.036.384.117,64
15	Rumah Sakit Umum Daerah	6.321.103.857,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.165.145.200,00
17	Dinas Ketenagakerjaan	2.564.000,00
18	Dinas Sosial	85.888.550,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	679.291.800,00
20	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	191.862.000,00
21	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	338.717.436,00
22	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	813.802.500,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	551.774.000,00
24	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	588.539.996,00
25	Dinas Perdagangan	226.208.800,00
26	Badan Pengelola Keuangan Daerah	652.477.560,00
27	Inspektorat	840.003.500,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Daerah	204.097.850,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	1.795.167.500,00
30	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	823.973.704,77
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	114.965.000,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	434.868.005,00
33	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	296.321.050,00
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	213.530.900,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2020 (Rp)
1	2	3
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.079.686.500,00
	Jumlah	65.713.984.207,21

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap berupa kapitalisasi sebesar Rp5.481.246.554,73. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp6.724.398.852,00 dengan rincian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.143.955.154,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp210.000.000,00, RSKB Sayang Ibu sebesar Rp18.047.700,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp981.623.000,00, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp166.772.998,00 dan Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah sebesar Rp204.000.000,00.
 - 4) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.379.993.978,23.
 - 5) Penilaian/Utang sebesar Rp1.375.000,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan pengadaan 1 unit thermogun (alat pengukur suhu) pada Puskesmas Kariangau yang aset tetapnya telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB B) Peralatan dan Mesin, namun belum dibayarkan pada tahun anggaran 2020.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp24.704.775.550,20 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp248.172.600,00 pada Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan proses penghapusan barang dengan kondisi baik dari daftar inventaris barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-213 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Balikpapan Utara Dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Balikpapan akibat dampak musibah kebakaran Kantor kelurahan Graha Indah.
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp1.195.025.212,00 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 91 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya TA 2020

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	197.674.510,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	49.197.000,00
3	Dinas Pertanahan Penataan Ruang	45.468.500,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.311.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46.310.000,00
6	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu	49.665.000,00
7	Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah	37.400.000,00
8	Bappeda Litbang	180.558.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	248.612.802,00
10	BKPSDM	305.828.400,00
	Jumlah	1.195.025.212,00

- 3) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp448.975.396,00.
- 4) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar Rp21.977.020.342,20 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 92 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat DPRD	10.615.000,00
2	Kecamatan Balikpapan Timur	3.096.500,00
3	Kecamatan Balikpapan Utara	18.486.000,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp)
1	2	3
4	Kecamatan Balikpapan Kota	8.100.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	928.180,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.325.000,00
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	350.000,00
8	Dinas Perhubungan	31.914.000,00
9	Dinas Kesehatan	287.198.928,20
10	Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu	495.000,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	52.059.813,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.375.203.621,00
13	Dinas Sosial	3.215.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.553.800,00
15	Dinas Pangan Pertanian Perikanan	2.750.000,00
16	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	48.702.500,00
17	Dinas Perdagangan	13.860.000,00
18	Inspektorat	25.740.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	25.364.000,00
20	Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata	3.480.000,00
21	Satpol PP	6.160.000,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.927.500,00
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	935.000,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.560.500,00
	Jumlah	21.977.020.342,20

- 5) Penilaian/Utang sebesar Rp835.582.000,00 merupakan realisasi pembayaran atas pengadaan peralatan dan mesin yang bersumber dari Bos Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun anggaran 2020, namun aset tetapnya telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB B) di tahun anggaran 2019.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 6) Kondisi lain tentang Aset Peralatan dan Mesin Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
- Terdapat aset kendaraan dinas yang belum memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 100 unit berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 44 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 56 unit di sajikan pada **Lampiran .19.5**
 - Pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan mesin Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk pinjam pakai dilakukan sesama instansi pemerintah sebanyak 6 (enam) perjanjian yang disajikan pada **Lampiran 19.5.1**
 - Terdapat aset peralatan dan mesin yang masih bernilai Rp0,00 yang tercatat pada aplikasi Simda BMD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 93 Rincian Aset Peralatan dan Mesin yang Bernilai Rp0,00

No	Perangkat Daerah	Kode Barang	Register	Nama Barang	Tahun	Nilai Barang	Keterangan
						(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagian Umum dan Perlengkapan	1.3.2.02.001.003.002	7	Pick Up	2001	0,00	Belum Dilakukan Penilaian
2	Dinas Pendidikan	1.3.2.02.001.004.001	117	Sepeda Motor	2006	0,00	Belum Dilakukan Penilaian
3	Dinas Pendidikan (SDN 005 TIMUR)	1.3.2.07.002.005.025	000002 s/d 000003	Tangga Injak Berlaci	2017	0,00	Belum Dilakukan Penilaian
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.3.2.08.001.056.081	000001 s/d 000003	Meja Kerja	2004	0,00	Belum Dilakukan Penilaian

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp3.880.708.672.740,14 Rp3.831.427.649.556,19

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.880.708.672.740,14 dan Rp3.831.427.649.556,19 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas yang terdiri dari bangunan gedung. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada TA 2020 sebesar Rp49.281.023.183,95 atau sebesar 1,29%.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.000.000,00 ke atas. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada pada Tahun 2020 sebesar Rp3.880.708.672.740,14 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 94 Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4
I.	Saldo Aset Gedung dan Bangunan TA 2019 (<i>Audited</i>)		3.831.427.649.556,19
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2020		
	a. Realisasi Belanja Modal TA 2020	75.077.627.280,00	
	b. Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	10.543.133.060,26	
	c. Terima Hibah	282.838.158,69	
	d. Terima Mutasi dari SKPD Lain	827.242.058,00	
	e. Ditemukan/Hasil Inventarisasi	231.000.000,00	
	f. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.862.039.654,58	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		88.823.880.211,53
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2020		
	a. Mutasi Ke SKPD lain	827.242.058,00	
	b. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	37.935.517.875,90	
	c. Reklasifikasi ke Persediaan (biaya)	4.817.200,00	
	d. Barang di bawah kapitalisasi	775.279.893,68	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		39.542.857.027,58
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2020		3.880.708.672.740,14
V.	Akumulasi Penyusutan		(664.008.024.340,34)
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2020		3.216.700.648.399,80

- a. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2019 (*Audited*) sebesar Rp3.831.427.649.556,19.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp88.823.880.211,53 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2020 sebesar Rp 75.077.627.280,00 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 95 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2020 (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat DPRD	631.645.020,00
2	Kecamatan Balikpapan Selatan	76.528.500,00
3	Kecamatan Balikpapan Barat	64.996.000,00
4	Kecamatan Balikpapan Utara	4.150.000,00
5	Kecamatan Balikpapan Tengah	165.342.822,00
6	Kecamatan Balikpapan Kota	168.559.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum	45.291.250.068,51
8	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1.101.569.977,45
9	Dinas Perhubungan	628.596.343,53
10	Dinas Kesehatan Kota	240.091.700,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.629.007.686,94
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	252.240.641,00
13	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	3.869.250,00
14	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	2.271.145.226,90
15	Dinas Perdagangan	336.574.810,00
16	Badan Pengelola Keuangan Daerah	439.883.573,02
17	Dinas Lingkungan Hidup	652.390.096,65
18	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	2.107.387.364,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.399.200,00
	Jumlah	75.077.627.280,00

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp10.543.133.060,26. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 3) Terima Hibah sebesar Rp 282.838.158,69, dengan rincian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 253.227.377,00, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 29.610.781,69.
 - 4) Terima mutasi dari OPD lain sebesar Rp827.242.058,00.
 - 5) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp 231.000.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan Bangunan Rumah Dinas Golongan III yang belum tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan yang terdiri dari 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas Golongan III di Komplek Perumahan Praja Bakti Kelurahan Gunung Samarinda Baru senilai Rp182.000.000,00, dan 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas Golongan III di Komplek Perumahan Martadinata senilai Rp49.000.000,00.
 - 6) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp1.862.039.654,58.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp39.542.857.027,58 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Mutasi ke OPD lain sebesar Rp827.242.058,00.
 - 2) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp37.935.517.875,90.
 - 3) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.817.200,00.
 - 4) Koreksi kurang nilai Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar Rp775.279.893,68 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 96 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Gedung dan Bangunan (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	130.327.000,00
2	Kecamatan Balikpapan Selatan	34.033.500,00
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	10.615.100,00
4	Kecamatan Balikpapan Kota	60.117.000,00
5	Dinas Kesehatan	22.567.820,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	10.450.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	287.342.880,00
8	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	9.680.000,00
9	Badan Pengelola Keuangan Daerah	141.641.593,68



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Gedung dan Bangunan (Rp)
1	2	3
10	Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata	68.505.000,00
	Jumlah	775.279.893,68

5) Aset Tetap Masih Dicatat Secara Gabungan (Tidak Per Unit Aset) dengan total nilai Sebesar Rp6.534.246.465,90.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp3.186.760.130.538,47 Rp2.911.177.693.181,36

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.186.760.130.538,47 dan Rp2.911.177.693.181,36 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2020 sebesar Rp275.582.437.357,11 atau sebesar 9,47%.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebesar Rp 25.000.000,00 ke atas. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2020 sebesar Rp3.186.760.130.538,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 97 Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4
I.	Saldo Aset Jalan Jaringan Dan Irigasi TA 2019 (Audited)		2.911.177.693.181,36
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2020		
	a. Realisasi Belanja Modal TA 2020	260.738.034.953,11	
	b. Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	35.672.299.387,94	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	40.546.700.420,67	
	d. Koreksi	336.038.363,06	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		337.293.073.124,78
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2020		



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2		3	4
	a.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	11.948.834.550,55	
	b.	Reklasifikasi ke Persediaan (Biaya)	48.240.840.830,57	
	c.	Barang di bawah kapitalisasi	1.520.960.386,56	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi			61.710.635.767,68
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2020			3.186.760.130.538,47
V.	Akumulasi Penyusutan			(1.852.784.340.879,46)
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2020			1.333.975.789.658,99

- a. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 (*Audited*) sebesar Rp2.911.177.693.181,36.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp337.293.073.124,78 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Realisasi Belanja Modal 2020 sebesar Rp260.738.034.953,11 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 98 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2020 (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	131.973.600,00
2	Kecamatan Balikpapan Timur	686.900.000,00
3	Kecamatan Balikpapan Selatan	1.523.625.800,00
4	Kecamatan Balikpapan Barat	1.020.812.970,00
5	Kecamatan Balikpapan Utara	1.658.688.715,00
6	Kecamatan Balikpapan Tengah	1.228.246.283,00
7	Kecamatan Balikpapan Kota	714.008.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum	239.449.617.897,72
9	Dinas Perumahan dan Pemukiman	434.422.600,00
10	Dinas Perhubungan	12.083.578.867,00
11	Dinas Kesehatan Kota	219.601.800,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	171.091.390,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2020 (Rp)
1	2	3
13	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	19.625.600,00
14	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	183.628.500,00
15	Dinas Perdagangan	688.744.100,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	476.468.830,39
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	47.000.000,00
	Jumlah	260.738.034.953,11

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp35.672.299.387,94. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.
- 3) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp40.546.700.420,67.
- 4) Koreksi sebesar Rp336.038.363,06 merupakan kapitalisasi aset tetap Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu sebesar Rp193.134.183,88, Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu II sebesar Rp72.366.507,36 dan Pekerjaan Jalan Menuju Kampus ITK Balikpapan sebesar Rp70.537.671,82 yang pada tahun 2019 nilai aset tetap tersebut dikoreksi menjadi uang muka belanja akibat koreksi lebih catat aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan di KIB F yang nilai pembayaran pekerjaan lebih besar daripada prestasi fisik per 31 Des 2019.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp61.710.635.767,68 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp11.948.834.550,55.
 - 2) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp48.240.840.830,57.
 - 3) Koreksi kurang nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di bawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar sebesar Rp1.520.960.386,56 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 99 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Jalan Jaringan Irigasi (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	38.805.800,00
2	Kecamatan Balikpapan Selatan	80.885.650,00
3	Kecamatan Balikpapan Barat	88.295.100,00
4	Kecamatan Balikpapan Utara	24.684.200,00
5	Kecamatan Balikpapan Tengah	95.318.169,00
6	Kecamatan Balikpapan Kota	231.880.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum	2.476.600,00
8	Dinas Kesehatan	44.831.400,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	817.301.704,06
10	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	51.685.563,50
11	Dinas Perdagangan	24.796.200,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00
	Jumlah	1.520.960.386,56

- d. Kondisi lain tentang Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan Kota Balikpapan, bahwa terdapat Pembangunan Drainase Tersier Inteldam dengan nilai fisik sebesar Rp6.375.593.963,80 merupakan realisasi belanja modal Dinas Pekerjaan Umum tahun 2020 yang fisik pekerjaannya sebagian dibangun di wilayah kawasan Inteldam dan sebagian lainnya dibangun di luar kawasan Inteldam dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pekerjaan yang dibangun di wilayah kawasan Inteldam dengan nilai fisik sebesar Rp4.998.894.809,61.
 - 2) Pekerjaan yang dibangun di luar kawasan Inteldam dengan nilai fisik sebesar Rp1.376.699.154,19.
 - 3) Sedangkan nilai perolehan aset tetap Pembangunan Drainase Tersier Inteldam tercatat pada KIB D (Jalan Irigasi Jaringan) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.590.737.369,72 yang merupakan nilai fisik pekerjaan drainase beserta nilai atribusinya.
- e. Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) yang tercatat dalam KIB Aset Tetap JIJ belum dilengkapi dengan informasi yang memadai dengan total nilai aset sebesar Rp180.691.875.856,90



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp70.399.499.845,85 Rp62.747.452.185,24

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp70.399.499.845,85 dan Rp62.747.452.185,24 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya pada TA 2020 sebesar Rp7.652.047.660,61 atau sebesar 12,19%.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 sebesar Rp70.399.499.845,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 100 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4
I.	Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2019 (Audited)		62.747.452.185,24
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2020		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2020	26.640.039.254,19	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	6.318.452.135,03	
c.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.215.556.954,58	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		34.174.048.343,80
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2020		
a.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3.538.118.780,14	
b.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	22.898.321.003,05	
c.	Reklasifikasi ke Persediaan (biaya)	4.428.000,00	
d.	Barang di bawah kapitalisasi	81.132.900,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		26.522.000.683,19
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2020		70.399.499.845,85
V.	Akumulasi Penyusutan		(3.353.476.986,00)
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2020		67.046.022.859,85

- a. Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2019 (*Audited*) sebesar Rp62.747.452.185,24.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp34.174.048.343,80 dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1) Realisasi Belanja Modal 2020 sebesar Rp 26.640.039.254,19 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 101 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2020 (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat DPRD	7.425.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	8.591.084.480,00
3	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.075.041.586,63
4	Dinas Kesehatan Kota	3.248.810.407,06
5	Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu	521.408.097,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	1.429.287.920,50
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.412.276.263,00
8	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	31.900.000,00
9	Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah	348.876.000,00
10	Badan Pengelola Keuangan Daerah	18.150.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Daerah	588.946.900,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	24.200.000,00
13	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	342.632.600,00
	Jumlah	26.640.039.254,19

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp6.318.452.135,03.
- 3) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp1.215.556.954,58.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp26.522.000.683,19 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp3.538.118.780,14 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 102 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pekerjaan Umum	1.507.104.293,51
2	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1.075.041.586,63
3	Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah	348.876.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	18.150.000,00
5	Inspektorat	588.946.900,00
	Jumlah	3.538.118.780,14

- 2) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp22.898.321.003,05.
- 3) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.428.000,00.
- 4) Koreksi kurang nilai Aset Tetap di bawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar Rp81.132.900,00 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 103 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap Lainnya (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.250.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	58.882.900,00
	Jumlah	81.132.900,00

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi mulai Tahun 2020, penyusutan Aset Tetap Lainnya hanya diberlakukan pada Alat Musik Modern dan Aset Tetap Renovasi saja, Selain kedua jenis aset tersebut, tidak dilakukan penyusutan.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
(KDP) Rp133.261.868.724,28 Rp166.700.636.271,94

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp133.261.868.724,28 dan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Rp166.700.636.271,94 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2020 sebesar Rp33.438.767.547,66 atau sebesar 20,06%.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2020 sebesar Rp133.261.868.724,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 104 Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4
I.	Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2019 (<i>Audited</i>)		166.700.636.271,94
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2020		
a.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	4.276.257.817,44	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		4.276.257.817,44
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2020		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	37.518.728.315,10	
b.	Barang di bawah kapitalisasi	196.297.050,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		37.715.025.365,10
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2020 (I+II-III)		133.261.868.724,28

- a. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2019 (*Audited*) sebesar Rp166.700.636.271,94.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020 sebesar Rp4.276.257.817,44 disebabkan reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp4.276.257.817,44.
- c. Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020 sebesar Rp37.715.025.365,10 dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp37.518.728.315,10.
 - 2) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap di bawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca Aset Tetap sebesar Rp196.297.050,00 dapat di lihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 105 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap Lainnya (Rp)
1	2	3
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	19.448.000,00
2	Dinas Pertanahan Penataan Ruang	5.940.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62.308.700,00
4	Dinas Pangan Kelautan Perikanan	3.869.250,00
5	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	43.231.100,00
6	Dinas Perdagangan	18.700.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	42.800.000,00
	Jumlah	196.297.050,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Tetap Rp(3.236.804.358.229,80) Rp(2.874.908.570.405,23)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah kumpulan dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Balikpapan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal pelaporan. Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp(3.236.804.358.229,80) dan Rp(2.874.908.570.405,23) atau mengalami kenaikan sebesar Rp(361.895.787.824,80) atau sebesar 12,59%. Pemerintah Kota Balikpapan menghitung Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan sistem perhitungan penyusutan dari aplikasi SIMDA BMD menggunakan tanggal perolehan sebagai dasar penentuan masa manfaat dan penyusutan dihitung secara tahunan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 106 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
1	2	3	4
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(716.658.516.024,00)	(634.764.734.249,01)
3	Gedung dan Bangunan	(664.008.024.340,34)	(585.015.520.336,34)
4	Jalan Jaringan Irigasi	(1.852.784.340.879,46)	(1.654.502.044.418,88)
5	Aset Tetap Lainnya	(3.353.476.986,00)	(626.271.401,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
1	2	3	4
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	TOTAL	(3.236.804.358.229,80)	(2.874.908.570.405,23)

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD TA 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 19.6**.

5.3.1.4. ASET LAINNYA Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp265.165.302.303,40 Rp274.043.492.174,79

Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan merupakan aset yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020. Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp10.428.294.191,50 Rp11.719.736.062,50

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.428.294.191,50 merupakan piutang angsuran yang belum dibayar/jatuh tempo yang timbul dari penjualan cicilan/angsuran aset milik Pemerintah Kota Balikpapan berupa rumah dinas berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-52 Tahun 2004 tentang Penghapusan atas Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventarisasi Kekayaan Milik Pemerintah Kota Balikpapan dan SK Wali Kota Balikpapan tentang Penjualan Rumah Daerah Gol III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 188.45-07/2010 tanggal 8 Januari 2010.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan penjualan rumah dinas di Komplek Praja Bakti Kelurahan Gunung Samarinda Baru berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 188.45-397 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Rumah Negara Golongan III Beserta Tanahnya yang akan Dipindahtanggankan dalam Bentuk Penjualan Kepada Penghuni yang Sah.

Nilai tagihan penjualan angsuran TA 2020, jika dibandingkan dengan nilai TA 2019, dapat digambarkan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 110 Rincian Aset yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	Tanah (Rp)	Bangunan (Rp)	Pengakuan BOT (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	PT Hasta Kreasi Mandiri <u>No. 180/1060/Huk/2001</u> No.014/LGL/SPK/ HKM/VII/01 23/07/2001 <u>No. 180/1060.A/Huk/2001</u> No.147/LGL/ADD- SPK/HKM/IX/0112-09-2001 Pembangunan dan Peremajaan Pasar Muara Rapak	40.429.200.000,00	74.925.450.000,00	40.429.200.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
2.	PT Bintang Hytien Jaya <u>No.180/16/Pemerintah Kota- Perj/III/2004</u> No. 078/BHJ-Perj III/2004 29/03/2004 Pembangunan dan Pengelolaan Balikpapan Plaza Hotel	12.680.000.000,00	120.000.000.000,00	12.680.000.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
3.	PT Hasta Kreasi Mandiri <u>No. 644.1/1087/PP/XII/2004</u> No.060/LGL/HKM- PKS/XII/200415-12-2004 <u>No. 644.1/1087.A/PP/2007</u> No.017/LGL/HKM- AD.I.PKS/XI/200707-11-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapa (Pasar Baru Square)	75.850.000.000,00	450.000.000.000,00	75.850.000.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

4.	PT Gusher Mitra Sejahtera <u>No. 030/59/PP-II/2007</u> No.001-PK/GNS- Pmd.Bpn/II/200702-02-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur	16.540.896.000,00	104.517.000.000,00	16.540.896.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
Jumlah		145.500.096.000,00	749.442.450.000,00	145.500.096.000,00	

5.3.1.4.4. Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp121.158.672.596,02 Rp116.659.677.805,88

Aset Tak Berwujud pada TA 2020 sebesar Rp121.158.672.596,02 yang terdiri dari kajian dan *software* merupakan nilai sebelum amortisasi sebesar Rp(84.424.041.017,06). Perhitungan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 111 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020

Uraian	Saldo Sebelum Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2020 (Rp)	Nilai Buku Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
Aset Tak Berwujud	121.158.672.596,02	(84.424.041.017,06)	36.734.631.578,96
Jumlah	121.158.672.596,02	(84.424.041.017,06)	36.734.631.578,96

Nilai mutasi Aset Tak Berwujud sebelum amortisasi per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 112 Mutasi Aset Tidak Berwujud Sebelum Amortisasi per 31 Desember 2020

Jenis Aset	Saldo Awal (Audited)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Des 2020
		TA 2020	TA 2020	
1	2	3	4	5
Aset Tak Berwujud	116.659.677.805,88	4.498.994.790,14	0,00	121.158.672.596,02
Jumlah	116.659.677.805,88	4.498.994.790,14	0,00	121.158.672.596,02

Penjelasan tambahan mengenai mutasi Aset Tak Berwujud sebelum Amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.158.672.596,02 adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal Aset Tak Berwujud TA 2019 (*Audited*) sebesar Rp116.659.677.805,88.
- b. Mutasi tambah Aset Tak Berwujud TA 2019 sebesar Rp4.498.994.790,14 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	(+) (Rp)	(-) (Rp)	TA 2020 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
7.	Uang Jaminan Sewa Rusunawa	2.486.628.667,65	569.489.750,00	(536.863.250,00)	2.519.255.167,65	Jaminan sewa rusunawa apabila penyewa tidak membayar tagihan selama tiga bulan berturut-turut pada OPD Disperkim senilai Rp536.863.250,00 dan Jaminan reklame yang bertujuan untuk jaminan pembongkaran kontruksi reklame pada OPD DPMP2T senilai Rp1.949.765.417,65 yang telah ditranser ke rekening kas daerah
	Jumlah	76.695.876.237,86	593.340.301,40	(2.486.262.154,00)	74.802.954.385,26	

Penjelasan Aset Lain-lain :

a. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Rp2.835.012.582,45

Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.835.012.582,45 merupakan uang jaminan atas pinjaman para pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Balikpapan sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Bankaltimtara dan PT Asuransi Kredit Indonesia dengan nomor perjanjian pada tabel berikut.

Tabel 114 Rincian Perjanjian Kerjasama Pinjaman UMKMK

No	Pihak	Nomor Perjanjian	Tanggal
1	2	3	4
1	Pemerintah Kota Balikpapan	Nomor 180/Hk/XI/2006	29 November 2006
2	Bank Kalimantan Timurtara	077/BPD-PST/PRJ/XI/2006	29 November 2006
3	PT. Asuransi Kredit Indonesia	PPK/PKS/28/XI/2006	29 November 2006



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap pinjaman dari pengusaha mikro Kota Balikpapan yang mengalami macet, Pemerintah Kota Balikpapan akan menanggung sebesar 35% dari jumlah kredit yang macet. Sedangkan sisanya ditanggung oleh Bankaltimara sebesar 30% dan PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar 35%. Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya disimpan dalam bentuk giro pada Bankaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0031440777.

b. Saldo Aset Tetap yang Menunggu Penghapusan Rp60.078.205.270,16

Penjelasan tambahan mengenai Aset Lain-lain atas uraian saldo Aset Tetap yang menunggu proses penghapusan sebesar Rp60.078.205.270,16 adalah sebagai berikut:

- 1) Aset kondisi rusak berat sebesar Rp59.116.802.726,16 tercatat pada rincian Aset Lain-lain di aplikasi SIMDA BMD per 31 Desember 2019;
- 2) Sedangkan penambahan nilai aset kondisi rusak berat sebesar Rp961.402.544,00 merupakan koreksi pencatatan aset atas DED yang sebelumnya tercatat pada Aset Tidak Berwujud (ATB) namun fisik pekerjaannya tidak akan dilanjutkan dan tidak termasuk pada rincian Aset Lain-lain di aplikasi SIMDA BMD disajikan pada **Lampiran 23**.

c. Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang Akan Dilikuidasi Rp8.696.000.000,00

Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat sebesar Rp8.696.000.000,00 telah direklasifikasi dari Investasi Permanen Pemerintah Kota Balikpapan menjadi Aset Lain-lain per 31 Desember 2013.

Penjelasan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat (KFC) sebesar Rp8.696.000.000,00 dapat dikemukakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 dilakukan kesepakatan bersama oleh Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Bontang, Bupati Kutai Timur, Bupati Paser, dan Direktur Utama PT Agro Bintang Dharma Nusantara menerangkan dan bermufakat sebagai berikut.

- 1) Menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 12 Maret 2002 Nomor 35 dibuat di hadapan ADI GUNAWAN, SH, notaris di Balikpapan para pihak telah mendirikan PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport yang berkedudukan di Balikpapan;
 - b) Perseroan Terbatas tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia karena persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pengesahan dari yang berwajib tersebut belum dipenuhi sendiri;
 - c) Hingga saat ini Perseroan Terbatas tersebut belum menjadi badan hukum karena tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada instansi yang berwenang. Maka berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Pelayaran Bintang Kalimantan Timur Transport bubar karena hukum; dan
 - d) PT Pelayaran Bintang Kalimantan Timur Transport tersebut bubar pada Tanggal 26 Mei 2011 melalui RUPS



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) Bermufakat untuk:
- menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport, tetapi tidak terbatas pada dua unit kapal;
 - menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport secara lelang dan hasil lelang dikurangi ongkos, sisanya akan dibagi berdasarkan perbandingan uang yang telah disetor ke dalam PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport;
 - apabila hasil penjualan aset kurang dari biaya yang wajib dibayar maka kekurangan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak dengan bagian yang sama;
 - menunjuk Pemerintah Kota Balikpapan bertindak untuk dan atas nama pendiri melaksanakan penjualan aset termasuk menjual dan berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan penilaian aset; dan
 - tentang kesepakatan bersama ini dengan semua akibatnya para pendiri PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut, Pos Investasi Permanen Kapal Fery Cepat disajikan pada pos Aset Lain-lain.

5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		Rp42.076.815.264,52	Rp44.064.166.848,37

Kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2020 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 115 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	Bertambah/ (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	Utang PFK	88.776.565,00	121.908.417,00	(33.131.852,00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.284.620.928,97	2.992.871.389,34	(708.250.460,37)
3	Utang Belanja	31.080.244.102,57	38.348.654.034,38	(7.268.409.931,81)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.623.173.667,98	2.600.733.007,65	6.022.440.660,33
	Jumlah	42.076.815.264,52	44.064.166.848,37	(1.987.351.583,85)

Penjelasan lebih rinci mengenai Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.3.2.1.1. Utang PFK **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp88.776.565,00 **Rp121.908.417,00**

Utang PFK per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.776.565,00 merupakan pungutan pajak atas belanja yang bersumber dari dana BOS Reguler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dipungut namun terlambat disetorkan ke kas negara sampai TA berakhir seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 116 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Utang PFK BOS Reguler	88.776.565,00	121.908.417,00	(33.131.852,00)
	Jumlah	88.776.565,00	121.908.417,00	(33.131.852,00)

Daftar rincian Utang PFK dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp2.284.620.928,97 **Rp2.992.871.389,34**

Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp2.284.620.928,97 merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak, beberapa retribusi dan sewa lahan atas pihak ketiga yang telah diterima di RKUD Kota Balikpapan atas manfaat yang akan diberikan pada periode berikutnya. Pendapatan Diterima Dimuka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 117 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	TA 2020 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	278.586.718,00	248.825.746,57	(278.586.718,00)	248.825.746,57	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Lahan
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD)	440.961.354,53	367.358.484,00	(440.961.354,53)	367.358.484,00	Pajak Reklame
3	RSUD Damai Beriman	2.700.000,00	7.500.000,00	(2.700.000,00)	7.500.000,00	Pemakaian Kekayaan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	TA 2020 (Rp)	Keterangan
						Daerah / Sewa ATM
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	702.416.709,76	386.019.779,09	(702.416.709,76)	386.019.779,09	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
5	Dinas Perhubungan	24.451.622,27	20.092.932,74	(24.451.622,27)	20.092.932,74	Izin Trayek (Angkot & Taxi)
		863.283.698,26	671.146.282,84	(863.283.698,26)	671.146.282,84	Parkir di Tepi Jalan Umum - Berlangganan
		388.399.461,95	389.308.166,55	(388.399.461,95)	389.308.166,55	Pengujian Kendaraan Bermotor - Darat
6	Badan Pengelola Keuangan Daerah	27.918.257,35	49.001.839,10	(27.918.257,35)	49.001.839,10	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM
7	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu	205.140.452,46	145.367.698,08	(205.140.452,46)	145.367.698,08	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing
8	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	59.013.114,75	0,00	(59.013.114,75)	0,00	Sewa Stadion
JUMLAH		2.992.871.389,34	2.284.620.928,97	(2.992.871.389,33)	2.284.620.928,97	

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

Rp31.080.244.102,57

Rp38.348.654.034,38

Utang Belanja sebesar Rp31.080.244.102,57 merupakan kewajiban-kewajiban yang belum dibayarkan sampai periode TA 2020 berakhir. Rekapitulasi Utang Belanja dapat digambarkan pada tabel berikut :



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 118 Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Utang Belanja Pegawai	26.803.765.820,20	30.262.795.187,27	(3.459.029.367,07)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.275.103.282,37	7.247.673.847,12	(2.972.570.564,75)
3	Utang Belanja Modal	1.375.000,00	838.185.000,00	(836.810.000,00)
	Jumlah	31.080.244.102,57	38.348.654.034,39	(7.268.409.931,82)

Utang belanja pada tabel di atas terdapat pada OPD dan BLUD yang terdiri dari :

- Belanja jasa listrik, air, telpon, internet dan barang jasa lainnya pada beberapa OPD.
- Utang tunjangan kinerja PNS, tambahan penghasilan PNS, Insentif Pemungutan Pajak dan Gaji Terusan
- Utang jasa layanan pada BLUD; dan
- Utang Belanja Modal pada Dinas Kesehatan (BLUD)

Rincian Utang Belanja OPD per 31 Desember 2020 dapat dilihat di **Lampiran 25** sedangkan Utang pada BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Lainnya Rp8.623.173.667,98 Rp2.600.733.007,65

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp8.623.173.667,98 merupakan utang atas *carry over* tunjangan profesi guru serta utang gaji pegawai Kementerian Agama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, utang jaminan pembongkaran reklame pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan utang jaminan sewa rusunawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman serta kelebihan pembayaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.4.1. Pendapatan - LO **Tahun 2020** **Tahun 2019**
Rp2.584.731.836.690,55 **Rp2.485.040.619.753,66**

Merupakan pendapatan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020. Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 120 Pendapatan LO TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	638.701.981.242,55	778.891.556.249,68
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.844.547.190.055,00	1.632.111.090.567,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	101.482.665.393,00	74.037.972.936,98
	Jumlah	2.584.731.836.690,55	2.485.040.619.753,66

5.4.1.1. Pendapatan Asli **Tahun 2020** **Tahun 2019**
Daerah (PAD) – LO **Rp638.701.981.242,55** **Rp778.891.556.249,68**

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp638.701.981.242,55 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 121 Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	458.296.106.419,53	576.802.011.205,39
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	52.485.279.645,23	59.047.940.779,18
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	27.242.079.365,55	16.870.674.739,20
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	100.678.515.812,24	126.170.929.525,91
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	638.701.981.242,55	778.891.556.249,68

Dari daftar tabel di atas dapat dijelaskan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO dengan uraian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 126 Pendapatan Transfer- LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4
PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.844.547.190.055,00	1.632.111.090.567,00	212.436.099.488,00
Bagi Hasil Pajak - LO	147.855.851.617,00	68.155.340.656,00	79.700.510.961,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	678.037.692.130,00	456.723.178.388,00	221.314.513.742,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	429.199.860.000,00	441.298.574.000,00	(12.098.714.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	163.060.712.142,00	96.979.225.444,00	66.081.486.698,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	71.303.699.000,00	120.899.279.041,00	(49.595.580.041,00)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	109.795.000.000,00	156.550.000.000,00	(46.755.000.000,00)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	245.294.375.166,00	291.505.493.038,00	(46.211.117.872,00)

**5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah – LO**

Tahun 2020
Rp101.482.665.393,00

Tahun 2019
Rp74.037.972.936,98

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.482.665.393,00. Merupakan pendapatan hibah yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak Ketiga lainnya.

Tabel 127 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	101.482.665.393,00	74.037.972.936,98	27.444.692.456,02
Pendapatan Hibah - LO	101.482.665.393,00	74.037.972.936,98	27.444.692.456,02
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	12.523.955.529,00	5.400.471.410,80	7.123.484.118,20
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -	6.328.779.561,59	3.927.390.063,00	2.401.389.498,59



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4
LO			
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	2.212.276.550,00	153.609.600,00	2.058.666.950,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	9.978.658.403,72	0,00	9.978.658.403,72
Pendapatan Hibah Aset Tetap	1.427.836.781,69	0,00	1.427.836.781,69
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	69.011.158.567,00	64.556.501.863,18	4.454.656.703,82

Dari uraian tabel sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. bahwa terdapat pendapatan hibah dari pemerintah senilai Rp12.523.955.529,00 yang diserahkan pada:
 - 1) PPKD sebesar Rp 6.960.000.000,00 yang merupakan hibah air minum perkotaan
 - 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hibah peralatan dan mesin sebesar Rp166.772.998,00 yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi.
 - 3) BPBD berupa hibah peralatan dan mesin sebesar Rp5.397.182.531,00 yang diperoleh dari BNPB.
- b. bahwa terdapat pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya senilai Rp6.328.779.561,59 yang diserahkan pada:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp6.288.628.361,59 yang merupakan hibah barang habis pakai dari instansi vertikal.
 - 2) RSKB Sayang Ibu yang merupakan hibah barang habis pakai sebesar Rp22.103.500,00 dan aset tetap senilai Rp18.047.700,00.
- c. bahwa terdapat pendapatan hibah Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp2.212.276.550,00 yang diserahkan pada:
 - 1) Enam Kecamatan sebesar Rp564.312.000,00 yang merupakan hibah barang habis pakai (sembako) dari perusahaan dan organisasi kelompok masyarakat yang disalurkan kembali ke masyarakat sebagai upaya penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19.
 - 2) Sekretariat Daerah Kota yang merupakan hibah barang habis pakai (wastafel) sebesar Rp1.609.114.550,00 yang disalurkan kembali ke masyarakat untuk penanggulangan covid-19.
 - 3) Dinas Tenaga Kerja yang merupakan hibah aplikasi sebesar Rp38.850.000,00 dari Pertamina.
- d. bahwa terdapat Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat sebesar Rp9.978.658.403,72 yang diserahkan pada:



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.590.243.961,00 yang merupakan hibah barang habis pakai (alat kesehatan) yang diperoleh dari sumbangan masyarakat dalam rangka penanganan pandemi covid-19.
 - 2) RSKB Sayang Ibu yang merupakan hibah barang habis pakai sebesar Rp4.240.000,00 yang diperoleh melalui sumbangan masyarakat.
 - 3) RSUD yang merupakan hibah barang habis pakai sebesar Rp5.100.626.204,00 yang diperoleh melalui sumbangan masyarakat.
 - 4) Tim Gugus Tugas Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 berupa sumbangan uang dari masyarakat sebesar Rp283.548.238,72
- e. bahwa terdapat pendapatan hibah aset tetap senilai Rp1.427.836.781,69 yang diserahkan pada:
- 1) Dinas Kesehatan hibah minibus sebesar Rp210.000.000 yang diperoleh dari Bank Indonesia
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hibah peralatan dan mesin (LCD, Laptop, Printer dll) sebesar Rp1.013.836.781,69 yang diperoleh dari Kemendikbud.
 - 3) BPPDRD berupa hibah peralatan dan mesin *tapping box* sebesar Rp204.000.000,00 yang diperoleh dari Bank Kaltimara.

5.4.2.	BEBAN – LO	Tahun 2020	Tahun 2019
		Rp2.277.220.617.487,83	Rp2.288.229.576.531,51

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode Tahun berkenaan. Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Beban LO terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer yang akan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.2.1.	Beban Operasi – LO	Tahun 2020	Tahun 2019
		Rp2.163.613.224.535,88	Rp2.285.088.344.004,51

Beban Operasi Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 128 Rincian Beban Operasi – LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)	Tahun 2019	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4
BEBAN OPERASI - LO	2.163.613.224.535,88	2.285.088.344.004,51	(121.475.119.468,63)
Beban Pegawai - LO	701.200.808.750,24	748.888.775.179,51	(47.687.966.429,27)
Beban Persediaan	69.121.361.515,51	74.408.760.487,76	(5.287.398.972,25)
Beban Barang dan Jasa	571.254.516.326,06	593.564.834.458,09	(22.310.318.132,03)
Beban Perjalanan Dinas	47.750.665.140,24	80.760.171.635,87	(33.009.506.495,63)
Beban Pemeliharaan	37.868.670.256,39	79.984.795.105,39	(42.116.124.849,00)
Beban Subsidi	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
Beban Hibah	121.762.214.509,22	125.973.556.673,59	(4.211.342.164,37)
Beban Bantuan Sosial	39.228.690.000,00	3.708.736.800,00	35.519.953.200,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	373.524.930.098,90	398.371.802.511,38	(24.846.872.412,48)
Beban Penyisihan Piutang	201.894.984.940,32	174.555.929.887,84	27.339.055.052,48
Beban Lain-lain	6.382.999,00	3.870.981.265,08	(3.864.598.266,08)

5.4.2.1.1. Beban Pegawai – LO

Tahun 2020

Tahun 2019

Rp701.200.808.750,24

Rp748.888.775.179,51

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp701.200.808.750,24 dan Rp748.888.775.179,51. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNSD sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 129 Rincian Beban Pegawai LO TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4
Beban Pegawai - LO	701.200.808.750,24	748.888.775.179,51	(47.687.966.429,27)
Beban Gaji dan Tunjangan	332.221.574.584,00	333.677.238.610,40	(1.455.664.026,40)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.4.2.1.3. Beban Barang dan Jasa- LO **Tahun 2020** **Tahun 2019**
Rp571.254.516.326,06 **Rp593.564.834.458,09**

Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp571.254.516.326,06 dan Rp593.564.834.458,09. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas di Pemerintah Kota Balikpapan. Beban barang dan jasa dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 131 Rincian Beban Barang dan Jasa- LO TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4
Beban Barang dan Jasa	571.254.516.326,06	593.564.834.458,09	(22.310.318.132,03)
Beban Jasa Kantor	84.911.083.697,47	81.364.028.070,37	3.547.055.627,10
Beban Premi Asuransi	6.950.079.000,00	3.853.830.250,00	3.096.248.750,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	37.171.346.188,20	37.467.241.499,00	(295.895.310,80)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.027.233.812,15	1.708.345.277,61	(681.111.465,46)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	702.011.999,00	1.534.210.800,00	(832.198.801,00)
Beban Sewa Alat Berat	827.189.534,46	0,00	827.189.534,46
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.878.994.074,00	6.027.655.863,00	(1.148.661.789,00)
Beban Makanan dan Minuman	45.811.287.231,00	76.463.553.359,00	(30.652.266.128,00)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	2.366.189.250,00	2.593.180.599,00	(226.991.349,00)
Belanja Pakaian Kerja	2.791.035.190,00	6.219.117.310,00	(3.428.082.120,00)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.440.783.500,00	3.753.910.850,00	(1.313.127.350,00)
Beban Jasa Konsultasi	2.416.604.350,00	4.080.407.720,00	(1.663.803.370,00)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.247.170.522,40	0,00	6.247.170.522,40
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	268.769.000,00	200.378.203,00	68.390.797,00
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.887.908.812,00	5.533.589.293,00	(2.645.680.481,00)
Honorarium PNS	2.102.575.000,00	2.769.495.000,00	(666.920.000,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4
Honorarium Non PNS	187.750.880.080,18	171.956.672.054,84	15.794.208.025,34
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.077.821.967,00	14.723.740.000,00	(9.645.918.033,00)
Beban Pegawai BLUD RSKB Sayang Ibu	3.991.142.149,37	3.109.629.880,83	881.512.268,54
Beban Pegawai BLUD Puskesmas	9.921.175.006,08	8.450.727.262,40	1.470.447.743,68
Beban Pegawai Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.718.681.610,00	4.961.671.515,00	(3.242.989.905,00)
Beban Barang Dana Bos	50.738.102.208,00	49.159.861.663,00	1.578.240.545,00
Beban Barang KAPITASI JKN	803.473.584,57	3.231.295.691,17	(2.427.822.106,60)
Beban Jasa Berlangganan	621.017.246,36	362.684.368,64	258.332.877,72
Beban Pemeriksaan Laboratorium	587.873.768,00	471.234.584,00	116.639.184,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	30.758.923.161,49	4.306.816.401,80	26.452.106.759,69
Beban Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	4.579.983.744,33	3.890.088.417,34	689.895.326,99
Beban Pengadaan Alat-Alat Ukur	0,00	1.140.000,00	(1.140.000,00)
Beban Barang Perlengkapan Kantor	234.318.100,00	49.490.000,00	184.828.100,00
Beban Barang Perlengkapan Dapur	135.252.895,00	211.304.360,00	(76.051.465,00)
Beban Penyelesaian Perkara Hukum	279.000.000,00	212.000.000,00	67.000.000,00
Beban Kontribusi Lomba	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)
Beban Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	3.966.403.900,00	2.644.834.250,00	1.321.569.650,00
Beban Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	9.126.746.969,23	20.256.713.983,20	(11.129.967.013,97)
Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	4.988.310.293,47	4.604.395.908,97	383.914.384,50
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	885.286.568,00	2.841.620.535,00	(1.956.333.967,00)
Beban bahan Perlengkapan Kamar	54.707.000,00	24.092.000,00	30.615.000,00
Beban Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	99.466.200,00	13.095.000,00	86.371.200,00
Beban Pengadaan Alat-alat	0,00	9.150.250,00	(9.150.250,00)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp373.524.930.098,90 dan Rp398.371.802.511,38.

Tabel 135 Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4
Beban Penyusutan dan Amortisasi	373.524.930.098,90	398.371.802.511,38	(24.846.872.412,48)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	82.876.990.005,50	113.178.348.846,77	(30.301.358.841,27)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	79.887.489.955,00	78.699.816.050,34	1.187.673.904,66
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	200.541.104.821,58	179.298.178.733,77	21.242.926.087,81
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	10.219.345.316,82	27.195.458.880,50	(16.976.113.563,68)

5.4.2.1.10. Beban Penyisihan Piutang – Tahun 2020 Tahun 2019
LO Rp201.894.984.940,32 Rp174.555.929.887,84

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp201.894.984.940,32 dan Rp174.555.929.887,84 merupakan beban penyisihan atas Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 136 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Bertambah/(berkurang)
1	2	3	4
Beban Penyisihan Piutang	201.894.984.940,32	174.555.929.887,84	27.339.055.052,48
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	199.111.066.384,78	171.827.195.533,56	27.283.870.851,22
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.783.918.555,54	2.728.734.354,28	55.184.201,26



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.4.4. Beban Luar Biasa	Tahun 2020	Tahun 2019
	Rp112.336.172.351,95	Rp1.873.461.592,00

Jumlah Beban Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp112.336.172.351,95 dan Rp1.873.461.592,00. Beban Luar Biasa merupakan beban yang timbul untuk penanganan Pandemi Covid-19

SURPLUS/DEFISIT - LO	Tahun 2020	Tahun 2019
	Rp307.511.219.202,72	Rp194.937.581.630,15

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban. Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp307.511.219.202,72.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Penyajian laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Aktivitas Operasi	Rp748.825.150.838,92
	Rp798.993.438.681,27

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp798.993.438.681,27 menunjukkan bahwa penerimaan kas dari aktivitas operasi lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dimana arus masuk kas adalah sebesar Rp2.515.508.487.764,14 dan arus keluar kas sebesar Rp1.716.515.049.082,87. Adapun rincian arus kas dari aktivitas operasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 139 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Posisi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	Bertambah/ (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah	425.129.773.688,60	565.236.192.479,07	(140.106.418.790,47)
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah	49.272.540.221,33	55.653.797.069,87	(6.381.256.848,54)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.174.599.738,41	16.870.674.739,20	(696.075.000,79)
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.480.727.255,08	126.314.527.952,91	(7.833.800.697,83)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	147.855.851.617,00	68.155.340.656,00	79.700.510.961,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	678.037.692.130,00	456.723.178.388,00	221.314.513.742,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	429.199.860.000,00	439.818.664.000,00	(10.618.804.000,00)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	163.060.712.142,00	96.979.225.444,00	66.081.486.698,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	71.303.699.000,00	185.455.780.904,18	(114.152.081.904,18)
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	230.943.325.166,00	298.759.062.038,00	(67.815.736.872,00)
Penerimaan Pendapatan Hibah	283.548.238,72	3.000.000.000,00	(2.716.451.761,28)
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi	109.795.000.000,00	156.550.000.000,00	(46.755.000.000,00)
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan	75.971.158.567,00	0,00	75.971.158.567,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.515.508.487.764,14	2.469.516.443.671,23	45.677.875.446,19
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Belanja Pegawai	698.670.023.957,31	749.792.529.225,34	(51.122.505.268,03)
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	737.162.177.596,66	847.941.624.611,97	(110.779.447.015,31)
Pembayaran Belanja Subsidi	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
Pembayaran Belanja Hibah	119.747.002.459,22	114.721.353.514,00	5.025.648.945,22
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	39.228.690.000,00	2.228.826.800,00	36.999.863.200,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	1.271.220.600,00	3.141.232.527,00	(1.870.011.927,00)
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	120.435.934.469,68	1.865.726.154,00	118.570.208.315,68
Jumlah Arus Keluar Kas	1.716.515.049.082,87	1.720.691.292.832,31	(4.263.927.809,66)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	798.993.438.681,27	748.825.150.838,92	49.941.803.255,85



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Aktivitas Investasi Aset Non (Rp428.692.685.694,51) (Rp716.625.273.179,42)
Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berjumlah sebesar Rp(428.692.685.694,51) yang didapat dari selisih arus kas masuk dari penjualan aset tetap sebesar Rp0,00 dengan jumlah arus kas keluar dari realisasi belanja modal dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp428.692.685.694,51 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 140 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4
Arus Kas Masuk			-
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	11.995.000,00	(11.995.000,00)
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	11.995.000,00	(11.995.000,00)
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah	48.900.000,00	13.023.016.543,24	(42.787.721.041,76)
Perolehan Peralatan dan mesin	65.713.984.207,21	92.286.750.125,68	9.211.534.278,58
Perolehan Gedung dan Bangunan	75.077.627.280,00	136.068.318.925,39	29.793.284.314,24
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	260.738.034.953,11	415.921.306.815,97	87.835.175.136,38
Perolehan Aset Tetap Lainnya	26.640.039.254,19	29.376.833.846,74	(4.097.497.011,00)
Perolehan Aset Lainnya	474.100.000,00	1.094.455.100,00	(524.672.240,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	28.866.586.822,40	28.866.586.822,40



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Arus Keluar Kas	428.692.685.694,51	716.637.268.179,42	(273.284.582.484,91)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(428.692.685.694,51)	(716.625.273.179,42)	273.284.582.484,91

5.5.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp(14.660.000.000,00) **Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp(14.660.000.000,00) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp87.063.473,00 **Rp54.000,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris berjumlah sebesar Rp87.063.473,00 yang didapat dari selisih arus kas masuk dari penerimaan IWP, Taperum, PPh dan Penerimaan Lain-lain sebesar Rp39.680.779.588,68 dengan jumlah arus kas keluar sebesar Rp39.593.716.115,68 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 141 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4
Arus Kas Masuk			
Penerimaan IWP	22.677.780.100,00	23.270.036.332,00	(592.256.232,00)
Penerimaan Taperum	278.797.000,00	433.589.213,00	(154.792.213,00)
Penerimaan PPh	13.009.455.114,00	863.394.453,00	12.146.060.661,00
Penerimaan Lain lain	0,00	54.000,00	(54.000,00)
Penerimaan Pajak Dana BOS Reguler	3.714.747.374,68	0,00	3.714.747.374,68
Jumlah Arus Masuk Kas	39.680.779.588,68	24.567.073.998,00	15.113.705.590,68
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran IWP	22.677.780.100,00	23.270.036.332,00	(592.256.232,00)
Pengeluaran Taperum	278.797.000,00	433.589.213,00	(154.792.213,00)
Pengeluaran PPh	13.009.455.114,00	863.394.453,00	12.146.060.661,00
Pengeluaran Lain-lain	1.713.092,00	0,00	1.713.092,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4
Pengeluaran Pajak Dana BOS Reguler	3.625.970.809,68	0,00	3.625.970.809,68
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	39.593.716.115,68	24.567.019.998,00	15.026.696.117,68
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	87.063.473,00	54.000,00	87.009.473,00

Dari tabel diatas, diketahui terdapat saldo transitoris sebesar Rp87.063.473,00. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih Kas di Bendahara Pengeluaran BOS Reguler atas Pajak yang belum disetor di tahun 2020 sebesar Rp88.776.565,00 dan potongan Abonemen BRI atas penerimaan Pajak Daerah yang akan diterima kembali di tahun 2021 secara bertahap sebesar minus Rp1.713.092,00. Setelah menguraikan masing-masing aktivitas arus kas diatas, dapat diketahui kenaikan/penurunan kas selama periode tahun 2020 dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 142 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	2	3
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	798.993.438.681,27	748.825.150.838,92
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(428.692.685.694,51)	(716.625.273.179,42)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(14.660.000.000,00)	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	87.063.473,00	54.000,00
Kenaikan/Penurunan Kas	355.727.816.459,76	32.199.931.659,50
Saldo Awal Kas di BUD	323.831.718.088,05	291.631.786.428,55
Saldo Akhir Kas	679.559.534.547,81	323.831.718.088,05
Saldo Akhir Kas terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	607.178.376.440,27	272.604.485.686,69
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.655.318.916,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	32.832.816,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	2	3
Kas di BLUD dan kas lainnya	66.693.006.375,54	51.227.232.401,36
Saldo Akhir Kas	679.559.534.547,81	323.831.718.088,05

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1 EKUITAS AWAL **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp11.605.527.372.796,00 **Rp11.027.467.902.228,40**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp11.605.527.372.796,00 yang merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2019.

5.6.2 SURPLUS **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
/(DEFISIT) LO **Rp307.511.219.202,72** **Rp194.937.581.630,15**

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp307.511.219.202,72. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
PERUBAHAN **Rp146.235.206.304,90** **Rp383.121.888.937,36**
KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut:

**Tabel 143 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1.	Koreksi atas Pendapatan	0,00	(3.500.000,00)
2.	Koreksi atas Beban	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
3.	Koreksi Penyajian Aset Tetap Tahun Lalu	0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya	0,00	(734.147.070,06)
5	Koreksi Saldo Awal Penyusutan	3.878.923.567,09	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	142.356.282.737,81	383.859.536.007,42
	Jumlah	146.235.206.304,90	383.121.888.937,36

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat koreksi atas ekuitas Pemerintah Kota Balikpapan yang terjadi selama tahun 2020. Pada pos Koreksi Saldo Awal Penyusutan, diinformasikan bahwa beberapa OPD perlu dilakukan koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Hal ini dilakukan karena Reklasifikasi Aset Tetap sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Sementara Koreksi Ekuitas Lainnya dilakukan untuk mengkoreksi nilai Piutang beserta Penyisihannya, Koreksi Saldo Awal Ekuitas BUMD, Aset Dibawah Kapitalisasi, Penghapusan Aset, dan lainnya.

5.6.4. EKUITAS	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
AKHIR	Rp12.059.273.798.303,50	Rp11.605.527.372.795,90

Ekuitas Akhir Tahun 2020 sebesar Rp12.059.273.798.303,50 jika dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp11.605.527.372.796,00 mengalami kenaikan sebesar Rp453.746.425.507,62.

5.7. PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA

5.7.1. JAMINAN PEMELIHARAAN

Pada Tahun 2020, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang fisiknya telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% keuangannya dengan jaminan pemeliharaan berupa Garansi Bank yang diserahkan oleh pihak ketiga pelaksana pekerjaan. Jaminan Pemeliharaan tersebut berakhir melewati Tahun 2020. Rincian Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank tersebut adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 144 Rincian Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank TA 2020

No.	OPD	Nilai Jaminan Pemeliharaan
		(Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pekerjaan Umum	12.671.935.598,35
2.	Dinas Perumahan dan Permukiman	33.700.657,00
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.925.246,73
4.	Dinas Lingkungan Hidup	18.829.737,06
	Jumlah	12.751.391.239,14

5.7.2. DAMPAK PANDEMI COVID-19

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan telah mempertimbangkan peristiwa setelah tanggal pelaporan, khususnya dampak ketidakpastian yang mungkin timbul dari pandemi Covid-19 di masa depan terhadap posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas. Dampak ketidakpastian tersebut antara lain berupa:

- Potensi ketertagihan piutang pemerintah daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi Covid-19 termasuk estimasi atas dampak terhadap penyisihan piutang tersebut.
- Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban, khususnya kewajiban jangka pendek apakah terganggu akibat adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2020 sebagai dampak penanganan pandemik Covid-19.
- Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang tidak dilanjutkan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, termasuk yang terkait dengan eskalasi harga yang telah dilakukan atas proyek tersebut.
- Rencana Program Penanganan Krisis di tingkat pemerintah daerah dan dampaknya terhadap posisi dan pengelolaan keuangan.

5.7.3. KONTINJENSI

Terdapat 4 (tiga) gugatan perdata oleh masyarakat kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas kepemilikan aset tanah.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 145 Daftar Perkara Gugatan Perdata Pemerintah Kota Balikpapan

No	Objek Perkara	Nomor Perkara/Penggugat	Nilai Gugatan (Rp)
1	2	3	4
1	Gedung Kesenian	Dudinsyah	31.475.825.000
2	Waduk Teritip	Charles Hendra Kurniawan	2.080.000.000
3	SMP 023 Balikpapan	La Ode Mansyur	5.000.000.000
4	Jl. Jend. Sudirman	Amat Noor	1.495.344.800.000



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB VI
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan OPD dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan penerapan belanja daerah yang berprinsip pada pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut Ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SAP.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2020 ini, Pemerintah Kota Balikpapan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk terwujudnya Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian laporan keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.